

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**STRATEGI PEMBANGUNAN DESA SANGAT TERTINGGAL DI
KAWASAN SUAKAMARGA SATWA BUKIT RIMBANG BALING
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



FAHRIZAL ARIYADI

NPM : 147310528

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fsip@iur.ac.id Webs: www.iur.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1701A_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Name : Fahrizal Ariyadi
NPM : 147310528
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : strategi pembangunan desa sangat tertinggal di kawasan suakamarga satwa bukit rimbang baling kabupaten kamper
Persentase Plagiasi : 13%
Jumlah Halaman : 102 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi Turnitin (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Agustus 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK. 160702589



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian usulan penelitian ini yang berjudul. “Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar”. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Usulan penelitian ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulisan tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam penulisan Usulan Penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi.,SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Mulianto.,S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si selaku Dosen pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Bapak Budi Mulianto.,S.IP.,M.Si selaku Dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepada Pimpinan dan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat, serta Masyarakat Setempat Desa Tanjung Beringin, Gajah Betalut, Aur Kuning Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini baik dan jelas.
8. Kepada Ayahanda Haidison dan Salasyiah serta keluarga besar penulis yang telah memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini, yang Selalu memberikan semangat dan motivasi penulis untuk bisa menyelesaikan usulan penelitian ini.

9. Kepada orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai. Teman-teman Ilmu Pemerintahan G angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.
10. Kepada teman seperjuangan satu kontrakan Mahmud Saleh, Ari Andrean, Ahmad Abrar dan Ambisi Abdi Negara, Zultrio Firdana Putra yang mana banyak memberikan bantuan dan juga dukungan dalam pembuatan usulan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya.
11. Kepada teman seperjuangan saya di Organisasi HIMIP periode 2016-2018, adik-adik pengurus HIMIP 2018-2019, teman-teman pengurus BEM Fisipo UIR 2018-2019 serta teman-teman saya di Organisasi Eksternal HMI, IPNU, HIPPMATHU yang juga telah banyak memberikan motivasi dan juga bantuan didalam pembuatan usulan penelitian serta bantutan ilmu yang dibrikan untuk menyelesaikan usulan penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya yang diberikan.

Akhir kata hanya ucapan terimakasihlah yang bisa diberikan oleh penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan usulan penelitian. Semoga usulan penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikumWr.Wb.

Pekanbaru, 1 April
2019

Penulis

Fahrizal Ariyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN TIM PEMBIBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Kegunaan penelitian	22
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan.....	23
2.1.1 Pemerintahan	24
2.1.2 Pemerintah Daerah.....	28
2.1.3 Pemerintah Desa.....	32
2.1.4 Indek Desa Membangun.....	38
2.1.5 Pembangunan Desa	42
2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat.....	46
2.1.7 Sumber Daya Manusia	48
2.1.8 Organisasi.....	50

2.1.9 Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.....	52
2.10 Strategi	54
2.2 Kerangka Pikir	56
2.3 Konsep Operasional	57
2.4 Operasional Variabel.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	60
3.2 Lokasi Penelitian.....	60
3.3 Key Informan dan Informan.....	60
3.4 Jenis Dan Sumber Data	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	62
3.6 Teknik Analisis Data.....	63
3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	64
BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Singkat	65
4.1.1 Keadaan Provinsi Riau	65
4.1.2 Keadaan Kabupaten Kampar	67
4.1.3 Keadaan Desa Gajah Bertalut.....	69
4.2 Struktur Organisasi	82
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Key Informan dan Informan	83
5.1.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	85
5.1.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Upaya Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Kabupaten Kampar	103
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	109
6.2 Saran.....	110
DAFTAR KEPUSTAKAAN	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Rekap Status Perkembangan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Riau Indek Desa Membangun 2018.....	6
I.2 Aksesibilitas Desa-desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	15
I.3 Rekap Status Perkembangan Desa Sangat Tertinggal Dalam Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar	18
1.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gajah Bertalut Tahun 2018.....	19
I.5 Nama-nama Desa Sangat Tertinggal Yang Menjadi Objek Penelitian...	20
II.1 Penelitian Terdahulu	23
II.2 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangu.....	41
II.3 Penilaian Indeks Ketahanan Desa	41
II.4 Operasional Variabel Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	59
III.1 Key Infoman dan Informan.....	61
III.2 Jadwal Penelitian Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	64
IV. 1 Nama-nama Kabupaten/Kota Provinsi Riau	66
IV.2 Nama-nama Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Kampar .	68
IV.3 Nama-nama Pemangku Adat Desa Gajah Bertalut	70
IV.4 Luas Wilayah Desa Gajah Bertalut	71
IV.5 Jumlah Penduduk Desa Gajah Bertalut Berdasarkan Jenis Kelamin	72
IV.6 Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Pendidikan	73

IV.7	Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Gajah Bertalut.....	74
IV.8	Kegiatan Kesehatan Desa Gajah Bertalut	75
IV.9	Pemenuhan Air Bersih Desa Gajah Bertalut.....	76
IV.10	Jumlah Pemeluk Agamaan dan Jumlah Tempat Ibadah Desa Gajah Bertalut.....	76
IV.11	Pertanian dan Jenis Tanaman Di Desa Gajah Bertalut.....	77
IV.12	Jenis dan Jumlah Ternak Desa Gajah Bertalut.....	78
IV.13	Struktur Mata Pencarian Masyarakat Desa Gajah Bertalut.....	79
IV.14	Nama-nama Lembaga Kemasyarakatan Desa Gajah Bertalut	81
IV.15	Susunan Struktural Desa Gajah Bertalut	82
IV.16	Susunan Struktural Badan Permusyawaratan Desa	82
V.1	Identitas Key Informan dan Informa.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pedoman Wawancara Penelitian Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	118
2. Tabel Hasil Wawancara Peneliti Di Lapangan	139
3. Photo Dokumentasi Wawancara Penelitian Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	148
4. Data Rencana Pembangunan Jalan Jalur Interpretasi Melalui Dana Desa.....	165
4. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Nomor : 1075/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Fahrizal Ariyadi.....	166
5. Surat Keterangan Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22786 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau an. Fahrizal Ariyadi.....	167
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Tranmigrasi, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.....	168
6. Jurnal bahan penelitian.....	200

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrizal Ariyadi
NPM : 147310528
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : "Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar"

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 Juli 2019

MATERAI
TEMPEL
2019TAEF1<137200
6000
PEKANBARU

Fahrizal Ariyadi

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA SANGAT TERTINGGAL DI KAWASAN SUKAMARGA SATWA BUKIT RIMBANG BALING KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

FAHRIZAL ARIYADI

Kata Kunci : Strategi, Pembangunan, Pemerintah

Dalam penelitian ini membahas tentang strategi pembangunan desa sangat tertinggal, melihat bagaimana upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengembangan desa yang berstatus Sangat Tertinggal yang tertuang dalam Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Penilaian desa yang berstatus sangat tertinggal ialah desa yang memiliki IDM terendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta Pemerintah Desa dalam mempercepat pembangunan desa yang berstatus Sangat Tertinggal dalam Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang. Indikator penilaian yang di gunakan adalah Pemeberdayaan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Sarana Prasarana, Kelembagaan Desa. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah "Kualitatif" metode penelitian "Kualitatif" adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cocok menggunakan Analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Sumber data yang dipergunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data dalam peneltian ini yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, adapun Key Informan dalam penelitian adalah Kasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kabupaten Kampar dan Informan Kepala Desa, Staf Desa, Ketua Pemuda, Masyarakat Setempat. Lokasi penelitian yaitu Desa Gajah Betalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Berdasarkan teknik analisis peneliti dan menyimpulkan bahwa pembangunan desa sangat tertinggal dalam kawasan telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah daerah kabupaten kampar dan pemerintah desa gajah betalut dengan secara betahap pembangunan yang diperlukan oleh desa dengan menggunakan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa, namun masih lemah dalam segi ekonomi masyarakat dikarenakan beberapa faktor, lemahnya SDM, anggaran yang terbatas dan

terfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Dan desa juga belum memiliki BUMDesa yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa.

**VILLAGE DEVELOPMENT STRATEGY IS HIGHLY STAYED IN
SUKAMARGA AREA SATWA BUKIT RIMBANG BALING, KAMPAR
DISTRICT**

ABSTRACT

FAHRIZAL ARIYADI

Keywords: Strategy, Development, Government

In this study discussing the strategy of rural development is very lagging behind, see how the efforts of the Regional Government and the Village Government in the development of highly disadvantaged villages as stipulated in Permendes, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 2 of 2016, namely Social Security Index, Economic Resilience Index and Ecological / Environmental Resilience Index. Very Disadvantaged, or can be called Primary Village, is a village that experiences vulnerability due to natural disasters, economic shocks, and social conflicts so that it is not capable of managing potential social, economic and ecological resources, and experiencing poverty in various forms. Village assessments that are very underdeveloped are villages that have the lowest IDM. The purpose of this study was to find out the Development Strategies used by the Government, Kampar District Government, and the Village Government in accelerating the development of highly disadvantaged villages in the Bukit Rimbang Wildlife Reserve Area. Assessment indicators that are used are Economic Empowerment, Quality of Human Resources, Development of Infrastructure, Village Institutions. The type of research used by researchers is "Qualitative" "Qualitative" research method is research on descriptive research that is suitable using Analysis. Process and meaning (subject perspective) are more highlighted in this study. The theoretical foundation is used as a guide so that the focus of the research is in accordance with the facts in the field. Data sources used are Primary Data and Secondary Data. The data collection techniques in this research are Observation, Interview, Documentation, while the Key Informants in the research are the Head of the Rural Area Development Office of the PMD Kampar Regency and the Village Chief Informants, Village Staff, Youth Heads, Local Communities. The research locations were Gajah Betalut Village, Kampar Kiri Hulu Subdistrict, Kampar District, Riau Province. Based on the researchers' analysis techniques and concluded that village development is very lagging behind in the area, several efforts have been made by the local government of Kampar District and the village elephant government in the development stages needed by the villages by using Village Funds and Village Allocation Funds, but are still economically weak. community due to several factors, weak human resources, limited budget

and focused on infrastructure development. And villages also do not have BUMDesa which functions to empower the economy of rural communities

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data perkembangan desa merupakan kebutuhan pokok untuk mengukur bagaimana arah perubahan desa terjadi. Selama ini pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Puluhan triliun dana telah digelontorkan oleh pemerintah demi menjalankan misi pembangunan tersebut. Adan sekitar 73 terliun dana yang di lontarkan oleh pemerintah untuk memberatas desa yang masih tergolong atau berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal untuk tahun 2019, pada sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan 60 terliuan pada tahun 2018 untuk dana desa. Dana desa tersebut dialokasikan untuk kepentingan membangun desa dan pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.¹ Untuk mendukung percepatan pembangunan desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) telah menetapkan empat program prioritas. Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), membangun embung air desa,

¹ <https://www.kompasiana.com/deffianggi/5bdafda843322f57130d29b7/dana-desa-triliunan-tapi-banyak-desa-tertinggal?page=all>

mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan membangun Sarana Olahraga Desa (Raga Desa).²

Target pemerintah setidaknya mencapai 2.000 desa mandiri serta mengentaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Berjalannya misi ini tentu perlu pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, provinsi, kabupaten/kota agar pengelolaannya tepat sasaran sesuai kebutuhan dan keperluan untuk mencapai pembangunan daerah tertinggal.³

Desa tertinggal merupakan kawasan pedesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak ada, sehingga menghambat pertumbuhan serta perkembangan wilayah pedesaan, dan terjadinya kelemahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang ekonomi kemiskinan, bidang sosial, bidang pendidikan dan bidang lain yang menjadikan daerah tersebut tertinggal.

Ketertinggalan dan kemiskinan sangat dominan terjadi pada masyarakat desa, dibandingkan dengan masyarakat kota. Hal ini dikarenakan sektor moderen yang sangat besar sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi di perkotaan yang selalu mendapat kesempatan yang sangat luas, sehingga membawa kecenderungan melupakan potensi pedesaan pada sektor tradisional. Terkadang hal ini membuat pengaruh terjadinya pemindahan penduduk desa ke daerah perkotaan dikarenakan daerah perkotaan lebih sangat diuntungkan baik dalam segi ekonomi dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat dan arah perkembangan desa seperti faktor lokasi,

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3962422/4-program-prioritas-percepat-pertumbuhan-ekonomi-desa>

³ <https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-desa>

atau letak desa terhadap pusat-pusat fasilitas serta tidak memiliki jalan perhubungan antar desa.

Lokasi mengandung arti jarak suatu tempat desa dengan tempat lain yang berfungsi sebagai pusat dan dipengaruhi oleh kondisi prasarana perhubungan yang akan memberi pengaruh terhadap lancar atau tidaknya komunikasi sehingga mempengaruhi tingkat perkembangan desa. Jarak desa terhadap ibu kota propinsi, kota kabupaten, kota kecamatan, kondisi jalan perhubungan, kelas jalan, frekuensi jalan kecepatan perhubungan merupakan faktor-faktor penyebab adanya desa terisolir atau desa terpencil maupun desa tertinggal serta desa sangat tertinggal.

Indeks Desa Membangun, atau disebut dengan IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019), yakni mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa. Indeks Desa Membangun dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk mengentaskan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri di seluruh Indonesia, IDM ini mengedepankan pendekatan yang bertumpu kepada kekuatan sosial, ekonomi dan ekologi, tanpa melupakan kekuatan politik, budaya, sejarah, dan kearifan lokal. Indeks ini mengelompokkan desa kedalam lima kategori yaitu desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Indeks Desa Membangun mulai diluncurkan

pada tahun 2015 dengan bersumber pada data Potensi Desa yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).⁴

Indeks Desa Membangun (IDM) ini disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi, Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa. Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.⁵

Desa Membangun Indonesia dihadapkan pada kenyataan kemiskinan diakibatkan karena rendahnya produktivitas masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman desa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa wilayah Desa adalah tempat di mana sebagian besar penduduk miskin tinggal. Untuk itu, ketersediaan data dan pengukuran dalam konteks ini sangat dibutuhkan, terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan pemerintah yang mampu menjawab persoalan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesapdttrans-nomor-2-tahun-2016-tentang-indeks-desa-membangun>

Indeks Desa Membangun ini dibentuk berdasarkan tiga indeks, yang tertuang dalam Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada indikator sosial digunakan untuk melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat desa yang terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman wilayah pedesaan. Diindikator ekonomi digunakan untuk menggambarkan bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat desa yang dilihat dari keragaman produksi desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Dan terakhir yaitu indikator ekologi melihat bagaimana kondisi lingkungan desa dari variabel kualitas lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana.

Dari jumlah total 73.709 desa yang masuk dalam survei Indek Desa Membangun, Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menyebut bahwa ada 20.000 lebih desa tertinggal di seluruh Indonesia. Bahkan, jumlah itu termasuk pula dalam kategori desa sangat tertinggal. Bukan miskin secara finansial namun pula miskin pendidikan, miskin infrastruktur dan miskin segala hal. Sehingga desa susah maju dan menghadapi berbagai tantangan.⁶

Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni 2015, hanya 174 dari 73.709 desa yang menduduki kategori desa maju , disusul 3.608 desa mandiri , 22.882 desa berkembang, 33.592 desa tertinggal, dan 13.453 desa

⁶ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/27/mendes-sebut-masih-ada-20ribu-lebih-desa-tertinggal-di-seluruh-indonesia>.

sangat tertinggal. Berdasarkan rekap status perkembangan desa Indeks Desa Membangun 2018 ada 69,460 desa dan 6,855 berstatus desa Sangat Tertinggal.⁷

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Provinsi Riau adalah salah provinsi termasuk dalam program pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pada Rekap Status Perkembangan Desa Provinsi Riau berjumlah 1,591 Desa sesuai Indeks Desa Membangun 2018 dan terdapat 113 status desa sangat tertinggal, 683 tertinggal, 728 berkembang, 63 maju, dan 4 desa berstatus mandiri. Dalam hal ini tentu desa tertinggal lebih banyak.⁸

Tabel I.1 Rekap Status Perkembangan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Riau Indeks Desa Membangun 2018

No	Kabupaten	Data IDM						
		Jumlah Kec	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	Jumlah Desa
1.	Bengkalis	11	1	7	80	48	-	136
2.	Indragiri Hilir	19	-	3	54	122	18	197
3.	Indragiri Hulu	14	-	10	78	74	16	178
4.	Kampar	21	1	11	155	94	21	242
5.	Kepulauan Meranti	10	-		37	52	7	96
6.	Kuantan Singingi	15	-	3	48	133	34	218
7.	Pelalawan	12	-	4	51	45	4	104
8.	Rokan Hilir	15	-	3	69	78	9	159
9.	Rokan Hulu	17	-	10	89	36	4	139
10.	Siak	14	2	12	107	1	-	122
Total		149	4	63	728	683	113	1,591

Sumber: Indeks Desa Membangun 2018 Permendes PTD dan Transmigrasi

Berdasarkan tabel di atas terdapat 10 kabupaten yang perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan daerah perdesaan, karena masih terdapat desa

⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data->

⁸ EBOOK IDM 2018.pdf Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketimpangan pada pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini perlu adanya sebuah kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keluasaan pada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Hal ini dilakukan agar tujuan serta cita-cita masyarakat yang sejahtera sebagaimana diinginkan dapat segera terlaksana dan diwujudkan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalankan kehidupan secara wajar dan sebagaimana mestinya. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberi keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran keikutsertaan masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Oleh karena penyelenggara otonomi daerah

adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang pemerintahan daerah :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

Tugas pemerintah demi terciptanya cita-cita bangsa dalam hal pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum. Adapun pada dasarnya tugas pemerintah meliputi:

1. Tugas Mengatur
Menyakut peraturan yang di penuhi masyarakat, dimana dalam hal ini pemerinatah membuat perintah dan larangan.
2. Tugas Mengurus
Mengurus kesejahteraan rakyat, sosial, ekonomi, kesejahteraan dalam hal menyediakan sarana finansial dan personal.

Sementara itu urusan-urusan selain di atur oleh pemerintah pusat sisanya di serahkan pada pemerintahan Daerah. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
pembagian urusan itu antara lain :

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Peradilan/Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di katakan urusan wajib (yang berkaitan dengan pelayanan dasar) dan urusan pemerintahan pilihan (yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) yang menjadi urusan wajib meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kemudian dalam ayat 2 yang menjadi urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertahanan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;

- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Selain urusan wajib yang di serahkan oleh pemerintah pusat kedaerah, ada urusan pilihan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk dikelola dan di kembangkan dapat disebutkan beberapa urusan pilihan yang terdapat dalam pasal 12 ayat (3) mengenai urusan pilihan di maksud meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian/perkebunan;
- c. Kehutanan;
- d. Energy dan sumberdaya mineral;
- e. Parawisata;
- f. Perdagangan; dan
- g. Ketransmigrasian.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memberikan perubahan yang signifikan bagi pembangunan di Indonesia. Di harapkan daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memberdayakan potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing.

Salah satu urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah pemberdayaan masyarakat dan wilayah desa. Yang menjadi kewajiban pemerintah untuk memperhatikan hal ini sesuai yang tercantum dalam 12 ayat (2) huruf g Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah

dituntut untuk memberdayaan masyarakat yang berada didaerahnya. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tersebut maka daerah dituntut pula bagaimana pemberdayaan masyarakat dan wilayah pedesaan di Kabupaten Kampar yaitu :

1. Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan penataan desa
2. Kerjasama Desa
 - a. Fasilitas Kerjasama Desa dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/kota
3. Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemeberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemeberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati dengan sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang di dalamnya merupakan kesatuan hukum yang mengikat serta memiliki organisasi pemerintahan terendah yang langsung di bawah camat, dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa tercantum bahwa kewenangan desa meliputi, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa. Daerah pedesaan juga sangat luas wilayahnya, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, jika di lihat struktur perekonomiannya sangat besar pada

sektor pertanian, maka perlu adanya perhatian pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di pedesaan.

Peran pemerintahan daerah sangat penting dalam pengembangan desa sangat tertinggal. Peranan yang diberikan selain dalam bentuk sarana dan prasarana baik itu yang berupa sarana fisik non fisik maupun subsidi langsung, yang juga tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah juga harus memberikan bimbingan teknis dan non teknis secara terus menerus kepada masyarakat yang sifatnya mendorong dan memberdayakan masyarakat agar mereka dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri prasarana dan sarana untuk mendukung upaya percepatan pembangunan di desa tertinggal serta melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya. Dalam hal ini tentu pembangunan yang dilakukan perlu secara bersama-sama dikerjakan baik pemerintah dan juga masyarakat, pemerintah berperan untuk bisa memberikan bimbingan, pengarahan, pembinaan serta pengawasan kepada masyarakat. Dengan demikian bantuan yang diberikan bisa mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan bisa mengembangkan wilayahnya secara mandiri dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Wewenang pemerintah desa yang berlandaskan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pembangunan desa. Pembangunan kawasan pedesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam kabupaten/kota. Kemudian dalam pasal 78 berbunyi Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam pencapaian pembangunan desa, pemerintah desa membuat sebuah perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disingkat RPJM Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa hal ini di jelaskan pada pasal 6 ayat (3) antara lain :

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;
2. jalan pemukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
3. penguatan permodalan BUM Desa;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Desa;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Desa;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;
2. pembuatan terasering;
3. pemeliharaan hutan bakau;
4. perlindungan mata air;
5. pembersihan daerah aliran sungai;
6. perlindungan terumbu karang; dan
7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

Kemudian dalam Peraturan Bupati Kampar nomor 20 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan pemerinatah kabupaten kampar kepada desa. Kewenangan yang diberikan kepada desa dalam pasal 3 pada ayat

(b) adalah melaksanakan pembangunan desa, pengembangan dan sarana dan prasarana desa, peningkatan kualitas sosial desa, ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kabupaten kampar adalah salah satu kabupaten yang terdapat desa yang masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, kabupaten kampar memiliki 21 kecamatan dari jumlah tersebut ada beberapa didalamnya terdapat desa yang berstatus sangat tertinggal yaitu di Kecamatan Kampar Kiri Hulu di kecamatan ini terdapat lebih banyak desa yang berstatus sangat tertinggal daripada kecamatan lainnya, ada 10 desa berstatus Tertinggal dan 14 desa berstatus Sangat Tertinggal. Kecamatan Kampar Kiri Hulu terdiri dari 24 desa sebagian besar desa-desa di Kampar Kiri Hulu masuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal dari 24 desa, ada 8 desa diantaranya berada di dalam kawasan suaka marga satwa Bukit Rimbang Baling. Hal ini dibuktikan terbatansnya insfrastruktur minimnya jumlah sarana pendidikan, kesehatan, listrik, teknologi, rendahnya ekonomi masyarakat dan trasportasi darat yang kondisi jalan yang sangat rusak bahkan ada desa yang hanya bisa di tembus melalui transportasi air. Dan akses untuk menempuh ke desa-desa dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten cukup jauh dan memakan waktu yang lama.

Tabel. I.2 Aksesibilitas Desa-desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

NO	Desa	Jarak ke Ibukota Kecamatan Terdekat	Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten	Lama Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Aur Kuning	27 KM	2 Jam	160 KM	7.5 Jam

2.	Danau Sontul	25 KM	2 Jam	145 KM	6 Jam
3.	Deras Tanjak	30 KM	3 Jam	150 KM	6.5 Jam
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Gajah Bertalut	25 KM	2 Jam	135 KM	5 Jam
5.	Kebun Tinggi	32 KM	3 Jam	152 KM	6.5 Jam
6.	Lubuk Bingau	80 KM	4 Jam	170 KM	8 Jam
7.	Muarobio	12 KM	1 Jam	98 KM	4 Jam
8.	Pangkalan Kapas	93 KM	5 Jam	163 KM	7.5 Jam
9.	Pangkalan Serai	49 KM	4 Jam	147 KM	6 Jam
10.	Subayang Jaya	30 KM	3 Jam	136 KM	6 Jam
11.	Tanjung Beringin	16 KM	1.5 Jam	127 KM	4.5 Jam
12.	Tanjung Karang	80 KM	5 Jam	165 KM	7.5 Jam
13.	Tanjung Permai	83 KM	5 Jam	155 KM	6.5 Jam
14.	Terusan	25 KM	2 Jam	110 KM	6 Jam
15.	Batu Sanggan	3 KM	1 Jam	25 KM	2 Jam
16.	Batu Sasak	30 KM	2 Jam	160 KM	7 Jam
17.	Bukit Betung	2 KM	20 Menit	123 KM	2 Jam
18.	Dua Sepakat	29 KM	3 Jam	150 KM	5 Jam
19.	Gema	0.5 KM	5 Menit	120 KM	2 Jam
20.	Kota Lama	8 KM	1.5 Jam	124 KM	4 Jam
21.	Ludai	35 KM	2 Jam	110 KM	3 Jam
22.	Sungai Santi	5 KM	1 Jam	100 KM	2 Jam
23.	Tanjung Belit	2 KM	20 Menit	125 KM	2.5 Jam
24.	Tanjung Belit Selatan	1 KM	15 Menit	120 KM	2.5 Jam

Sumber : Dinas PMD Kampar 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat aksesibilitas desa-desa yang berda di Kecamatan Kampar Kiri Hulu untuk menempuh ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten sangatlah berbeda dan jauh. Kondisi desa-desa yang ada di kecamatan kampar kiri hulu terdiri dari empat kategori. Kategori *Pertama* adalah desa yang berada di aliran sungai Subayang yang terdiri dari delapan desa. Delapan desa itu yakni, Desa Pangkalan Serai, Desa Subayang Jaya, Desa Terusan, Desa Aur Kuning, Desa Gajah Bertalut, Desa Tanjung Beringin, Desa Batu Sanggan dan Desa Muara Bio. Kategori *kedua* adalah desa yang berada dialiran sungai (batang) Bio, di sepanjang aliran batang Bio terdapat empat desa yakni Desa Koto Lamo, Desa Sungai Santi, Desa Ludai, Desa Dua Sepakat serta

satu dusun yang masuk dalam wilayah desa Pangkalan Kapas. Kategori *ketiga* adalah desa yang berada di jalur kuning, ada 7 desa yang berada di jalur kuning ini yakni Desa Deras Setajak, Desa Tanjung Karang, Desa Batu Sasak, Desa Lubuk Bigau, Desa Kebun Tinggi, Desa Pangkalan Kapas dan Desa Tanjung Permai. Ada satu desa lagi yang berada antara jalur kuning dan sungai yakni desa Danau Santul. Kategori *keempat* adalah desa yang berada berdekatan dengan ibukota kecamatan, ada empat desa yang masuk dalam kategori IV ini yakni Desa Gema (Ibu Kecamatan), Desa Tanjung Belit, Desa Tanjung Belit Selatan dan Desa Bukit Betung. Empat desa ini sudah bisa ditempuh kendaraan roda empat.⁹

Di kotegori *Pertama* ada 8 (delapan) desa yang akses untuk menuju kelokasi tujuannya hanya bisa di tempuh melalui alat transportasi air yaitu Robin atau Sampan. Karena akses utama mereka hanya melalui sungai Subayang Jaya dengan menggunakan sampan dan sangat ditentukan oleh kondisi alam seperti adanya penambahan volume dan arus sungai akibat musim hujan. Kondisi delapan Desa tersebut cukup memperhatikan karena akses mereka untuk keluar desa menuju Ibu kota Kecamatan hanya menggunakan jalur air dan belum adanya akses jalan darat yang memungkinkan perkembangan desa akan lebih cepat dan mengurangi penghabatan prekonomian masyarakat di desa tersebut. Bupati Kampar juga menemukan berbagai permasalahan yang mendasar, permasalahan yang paling utama dihadapi oleh masyarakat di delapan desa yang berada di

⁹ <http://bappeda.kamparkab.go.id/web/detailberita/260>

pinggir Sungai Subayang diantaranya adalah persoalan transportasi, komunikasi, listrik, kesehatan, pendidikan dan persoalan lainnya.¹⁰

Sebagian desa bisa di tempuh jalan darat dan juga air, namun akses jalan darat penuh kerusakan yang berisiko cukup besar bagi masyarakat yang melewatinya dikarenakan jalan bebatuan serta apabila terjadi musim hujan jalan berlumpur, licin bahkan bisa terjadi longsor sewaktu-waktu. Hasil peneliti berdiskusi dilapangan bersama warga bahwa keberadaan mereka di wilayah tersebut sudah jauh didiami sejak ratusan tahun silam, sementara kawasan suaka marga satwa Bukit Rimbang Baling Baru ditetapkan pada tahun 1981. Dan peneliti melihat dilapangan bukan saja sulit akses untuk keluar dari perdesaan menuju Ibukota Kecamatan namun juga terbatasnya infrastruktur yang menyebabkan desa tersebut terisolir.

Tabel 1.3 Rekap Status Perkembangan Desa Sangat Tertinggal Dalam Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar

Indek Desa Membangun 2018					
NO	Nama Desa	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk	Nilai IDM	Status Desa
1.	Pangkalan Serai	30	515	0.4513	Sangat Tertinggal
2.	Subayang Jaya	41	364	0.4437	Sangat Tertinggal
3.	Terusan	43	364	0.4663	Sangat Tertinggal
4.	Aur Kuning	46	714	0.4863	Sangat Tertinggal
5.	Gajah Bertalut	36	484	0.4773	Sangat Tertinggal
6.	Tanjung Beringin	39	616	0.4662	Sangat Tertinggal
7.	Batu Sanggan	49	418	0.5076	Sangat Tertinggal
8.	Muara Bio	36	188	0.4737	Sangat Tertinggal

Sumber: *Indek Desa Membangun 2018 Permendes PTD dan Transmigrasi. Hasil Modifikasi Penulis, 2019*

¹⁰<http://www.suarakampar.com/berita-kunjungi-desa-terisolir-di-kampar-kiri-hulu-ini-permasalahan-yang-dihadapi-masyarakat-.html>

Dari table di atas penulis melakukan penelitian di desa Gajah Bertalut, desa ini terbentuk terjadi pemekaran wilayah yaitu induknya desa Batu Sanggan, untuk menempuh wilayah desa memakan waktu cukup lama yaitu sekitar 2-3 jam untuk sampai ke lokasi desa tersebut seperti tertera di tabel I.2 di atas. Desa Gajah Bertalut desa yang juga memiliki Hutan Adat seluas 4414 Ha yang bisa dikelola oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan terjaga kelestariannya, di samping itu bidang pariwisata pun sangat memungkinkan untuk digarap secara maksimal, terutama wisata alam dan budaya.

Pembangunan Desa Gajah Bertalut menggunakan DD dan ADD, Dana Desa (DD) pendapatan yang langsung dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah desa, diperuntukkan hanya untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) pendanaannya berasal dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan hanya untuk Aparatur Desa.

Tabel I.4 Anggaran Pendapatan Belanja Desa Gajah Bertalut Tahun 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
A. Pendapatan		1.471.699.000
1.	Pendapatan Asli Desa	-
2.	Dana Desa	783.694.000
3.	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	29.576.000
4.	Alokasi Dana Desa	558.429.000
5.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000
Jumlah Pendapatan		1.471.699.000
B. Belanja Desa		1.460.450.500
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	517.679.000
2.	Bidang Pembangunan Desa	776.065.365
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	54.450.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	112.256.135
5.	Bidang Tak Terduga	0
Jumlah Belanja		1.460.450.500
Surplus (Depisit)		11.248.500

Sumber : APBDES Gajah Bertalut 2018

Adapun pembangunan yang dilakukan Pemerintahan Desa Gajah Bertalut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2018 di antaranya :

1. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
 - Lapangan Bola Volly
 - Lapangan Batminton
 - Lapangan Bola Kaki
2. Pembangunan turap beton dusun III
3. Pembangunan Turap Dusun II
4. Pemabangunan Turap Beton Dusun II
5. Pembangunan MCK
6. Jalan Semenisasi Dusun II
7. Pemeliharaan Semeniasi Jalan Dusun III
8. Pembangunan Seminiasi
9. Pembangunan Jalan Tangga
10. Pembangunan Jalan Tangga Kampung Baru
11. Pembangunan Drainase Kampung Baru
12. Jalan Interpretasi

Dan perencanaan pembangunan pada tahun 2019 akan dibangunnya penerang jalan desa, dan Jalan Interpretasi. Pembangunan ini sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh desa, dikarenakan desa belum memiliki penerang jalan desa. Pembangunan-pembanguna yang dilaksanakan oleh desa gajah bertalut dengan mengunkan Dana Desa setiap tahunnya dengan mendahulukan keperluan dan kebutuhan desa.

Tabel I.5 Nama Desa Yang Menjadi Objek Penelitian

No	Nama Desa	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk	Nilai IDM	Status Desa
1.	Gajah Bertalut	36	484	0.4773	Sangat Tertinggal

Sumber: Indek Desa Membangun 2018 Permendes PTD dan Transmigrasi. Hasil Modifikasi Penulis, 2019

Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan observasi peneliti lapangan dan berbagai informasi mengenai desa terisolir atau desa yang berstatus sangat tertinggal di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa Gajah Bertalut, adapun fenomenanya adalah sebagai berikut :

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana infrastruktur seperti akses jalan utama yang hanya bisa melalui transportasi air yaitu sungai subayang. Akses ini menjadi alat utama masyarakat untuk keluar masuk antara desa dan ibukota kecamatan dengan menggunakan sampan untuk memenuhi ekonomi mereka dalam sehari-hari.
2. Cenderung rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan bertambah.
3. Terbatasnya tenaga listrik yang hanya bersumber dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) pemakaiannya hanya bisa digunakan malam hari serta tidak maksimal.
4. Peneliti melihat penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak adanya aparatur desa di kantor di waktu hari kerja yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yakni: ***“Bagaimana Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar ?”***.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Strategi Pembangunan yang digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta Pemerintah Desa dalam pembangunan desa yang berstatus Sangat Tertinggal dalam Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Pemerintah Desa dalam upaya pembangunan Desa Sangat Tertinggal dalam Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah :

- a. Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau bahan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian sejenis.
- b. Sebagai bahan masukan untuk seluruh unsur yang berkepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta Pemerintah Desa dalam upaya pembangunan desa yang berstatus Sangat

Tertinggal dalam Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling
 Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar” maka untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, membutuhkan teori yang keterkaitan agar penelitian ini terarah serta mengetahui jawabannya kemudian dibantu dengan analisis data.

Tabel. II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori
1.	ALMASDI SYAHZA	Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Menurut Syahza (2007b), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan.
2.	AHMAD YUSUF RANGKUTI	Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan	David (2002) ada rangka merumuskan strategi maka di bagi menjadi tiga tahapan yaitu (1) tahap input, (2) tahap pemaduan dan percocokan, dan (3) tahap keputusan.
3.	ELSA	Strategi Pengembangan Desa	Lukman Edy (2009:132),

		Tertinggal Di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok	strategi pengembangan desa tertinggal dapat dilakukan dengan rehabilitas dan pembangunan infrastruktur.
--	--	---	---

2.1.1 Pemerintahan

Pemerintahan merupakan bagian dari suatu ilmu dan juga seni. Sebagai sebuah seni, hal ini dikarenakan tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki sebuah pendidikan, namun dengan kharismanya pribadinya ia mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian, pemerintahan dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu karena ia memenuhi syarat – syarat sebagai ilmu pengetahuan diantaranya dapat dipelajari serta dianjurkan untuk memiliki objek material dan non-material, sifatnya umum (universal), sistematis dan spesifik (khas) (Syafiie, 2005 : 20).

Jika dilihat dari terminologinya Pemerintahan memiliki asal kata “Pemerintah”, yang kemudian dipersempit menjadi kata “perintah”. Kemudian, Ndraha (2003 : 5) menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan muti-proses dengan tujuan untuk memenuhi serta melindungi sebuah kebutuhan dan juga ada sebuah hal yang mengikat yang akan diperintahkan yaitu jasa publik dan juga layanan sipil. Hal yang mengikat tersebut didasarkan pada posisi yang ia miliki. Contoh dalam kasus ini seperti sovereign, pelanggan, konsumen, yang tidak memiliki daya-upaya dan seterusnya, management daripada legal drafting (penaskahan berbagai undang – undang, peraturan pemerintahan dan sebagainya).

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan kedalam beberapa istilah, diantaranya :

Pertama, Perintah dapat diartikan sebagai aktivitas “melakukan pekerjaan menyuruh”. Aktivitas ini melibatkan dua pihak yaitu rakyat sebagai yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah. *Kedua*, istilah perintah setelah ditambah awalan “pe-” menjadi pemerintah. Istilah ini kemudian dapat diartikan sebagai “Lembaga-Organisasi” yang menjalankan urusan yang dimaksud. *Ketiga*, istilah pemerintah kemudian diberikan imbuhan akhir “-an” menjadi pemerinatahan. Istilah ini memiliki makna perbuatan, cara atau perihal.

Selanjutnya, pengertian pemerintah dapat diartikan dalam dua cakupan yaitu makna secara sempit dan makna secara luas. Secara sempit, pemerintah diartikan oleh banyak pakar hanya sebatas lembaga Eksekutif saja yang melaksanakan fungsi untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, pemerintah diartikan oleh banyak ahli sebagai keseluruhan dari unsur pemerintahan yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Bevir (dalam Wasistiono dan Simangunsong 2015 : 87) bahwa adalah memposisikan pemerintah ibarat kemudi kapal (Istilah Yunani: Kybernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (*government as an institution*), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*government as an process*).

Sedangkan menurut Utrech (dalam Dharma 2007 : 38) Pemerintahan adalah dalam arti luas yaitu semua unsur kenegaraan yang menyelenggarakan pemerintahan. Karena itu pemerintahan berarti aktivitas yang dilakukan dalam upaya menerapkan sebuah kewajiban menjalankan tanggung jawab, seperti

pengaturan, penataan, serta perlindungan terhadap masyarakat dalam berkehidupan baik secara dalam sosial budaya, politik, ekonomi dan kamtibmas.

Kemudian, Kansil (2008 : 17) mengatakan perbedaan antara pemerintah yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan fungsinya dengan makna pemerintahan yang memiliki arti pemerintah sebagai sebuah fungsi daripada pemerintahan.

Menurut Ndraha (dalam Awang dan Mendra 2012 : 6) Pemerintah dapat diartikan sebagai oragan perlengkapan lembaga negara. Sedangkan pemerintahan adalah seluruh badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi serta melindungi kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan pelindung kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, Ndraha (2003 : 5) juga menjabarkan pemerintahan adalah merupakan sistem multiproses dalam sistem tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi serta memberikan perlindungan sebuah kebutuhan tuntutan yang akan diberikannya akan jasa publik yang berbentuk layanan civil, sedangkan pemerintah suatu oragan yang memiliki kewenangan untuk memproses pelayanan publik dan suatu bentuk kewajiban memproses pelayanan civil tersebut setiap anggota yang berhubungan dengan pemerintah.

Implikasi definisi ilmu pemerintahan merupakan bidang kajian materil (objek material) dan formal (objek formal) ilmu pemerintahan adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam hubungan kerakyatan, yaitu peristiwa, kejadian, atau gejala – gejala yang terjadi tatkala suatu pihak berhubungan (berkomunikasi,

berinteraksi) dengan yang lain pada posisi dan kondisi tertentu dan ilmu pemerintahan sangat erat dengan berbagai aspek kerakyatan: Budaya kerakyatan, seni kerakyatan, bahasa kerakyatan, komunikasi kerakyatan, ekonomi kerakyatan, politik kerakyatan, sejarah, antropologi, hukum, adat, tradisi dan lain – lain yang bersifat kerakyatan, disamping bidang kajian tradisional tentang berbagai aspek eksekutif seperti sistem, struktur, fungsi, dan perilaku.

Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan dimana dalam paradigma lama pemerintahan memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara (Yusri Munaf, 2016 ; 47)

Adapun fenomena semakin majunya masyarakat diikuti pula dengan meningkatnya permasalahan yang terjadi didalamnya, dan birokrasi yang cenderung terus semakin besar sehingga disekitar awal dekade 90-an muncul suatu paradigma baru dalam pemerintahan yakni good governance berasal dari istilah governance. Governance sebagai pengganti istilah Administrasi Negara (Yusri Munaf 2016 : 63).

Seorang pakar yang lain, yakni Muchlis Hamdi memberikan pandangan terkait dengan terminologi pemerintahan. Ia mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebagai suatu aktivitas, berbagai bentuk kegiatan atas dasar musawarah warga negara adalah pencerminan dari kebutuhan serta asa setiap masyarakat dalam rangka membentuk suatu kehidupan bersama yang tertib dan maju, agar

setiap orang dapat menjalani kehidupannya secara nyaman dan wajar. Pemerintahan dalam konteks hidup bersama setiap individu diharapkan dapat membantu mereka mewujudkan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup mereka, tidak dibatasi oleh apapun nilai dan kriteria yang mereka gunakan.

Kemudian makna lain tentang pemerintahan diutarakan oleh Syafiie dalam buku Ilmu Pemerintahan (2013 : 12). Ia mengatakan bahwa pemerintahan dapat disimpulkan sebagai komunitas masyarakat tertentu “baik melakukan (eksekusi) suatu kegiatan, maupun tidak berbuat sama sekali” dalam rangka mengkoordinasikan, pemimpin dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara bidang dan unit yang ada di dalam organ pemerintahan yang dipimpinnya.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Cheema dan Rondinelli (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 32) mendefinisikan desentralisasi sebagai “the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local government or non-government organizations.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Desentralisasi adalah tidak semata-mata sebuah pemindahan urusan atau administrasi, malah lebih luas, ia juga meliputi proses perencanaan, pembuatan keputusan dan pertanggungjawaban.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2013 : 83) mengatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemudian Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 33) melihat bahwa Desentralisasi sebagai penurunan kewenangan dari kantor pusat di ibu kota negara kepada kantor di ibu kota provinsi. Sejalan dengan itu, Edmond mendefenisikan Desentralisasi sebagai proses dimana kewenangan pembuatan keputusan yang bersifat keuangan dan administrasi diserahkan kepada unit subnasional atau unit – unit pemerintah pusat.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007 : 33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah.

Ada beberapa bentuk desentralisasi itu. Hal ini seperti dikemukakan oleh Bird dan Wallich (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 34) yang membagikan Desentralisasi kepada tiga bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi dan desentralisasi (devolusi). Sedangkan Litvac dan Seddon (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 34) membagikan Desentralisasi kedalam empat bentuk, yaitu *pertama* desentralisasi politik, *kedua* desentralisasi administrasi, (kemudian desentralisasi administrasi ini memiliki tiga bentuk dekonsentrasi, delegasi dan devolusi), *ketiga* desentralisasi fiskal dan *keempat* desentralisasi ekonomi atau pasar.

Sejalan dengan pembagian jenis Desentralisasi diatas, United Nations Development Programs (UNDP) dalam buku Yusoff dan Yusran (2007 : 35) juga membedakan jenis Desentralisasi kepada tiga bentuk yaitu, Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Keuangan (Fiskal).

Desentralisasi Politik diartikan sebagai pengalihan otoritas kepada masyarakat atau lembaga perwakilannya dalam proses perumusan dan implementasi undang-undang publik, dengan alasan bahwa undang-undang publik yang terbuka akan lebih baik dan relevan dengan kebutuhan publik jika dibandingkan dengan undang-undang publik yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Kemudian, Desentralisasi Administrasi adalah bentuk pengalihan otoritas, pertanggungjawaban, pembiayaan dan pengelolaan dalam pelayanan publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya kepada unit – unit lembaga pemerintahan atau korporat di tingkat lokal. Sedangkan Desentralisasi Fiskal adalah bentuk pengalihan otoritas dari pengambilan sumber – sumber pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, seperti pungutan berbagai pajak terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut, pajak perumahan dan sebagainya.

Kemudian sebagai konsekuensi dari Desentralisasi tersebut maka diadakanlah Otonomi Daerah yang artinya daerah otonom diberikan hak dan wewenang serta Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syafiie 2007 : 239).

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007 : 230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berKewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian menurut Rizwandi Imawan (dalam Awang dan Mendra 2011 : 25) Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal disana terjadi adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah lokal) merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi.

Menurut Nugroho (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 46) konsep Otonomi secara terminologinya adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu *autos* dan *nomos*. Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri. Sementara Daerah seringkali diartikan sebagai *local state goverment*. Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local self goverment* yaitu hak, wewenang dan Kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Smith (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 39) mengemukakan beberapa alasan mengapa Desentralisasi sangat diperlukan dan penting dalam organisasi publik, diantaranya ialah:

- a. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Sebagai arena pendidikan dan latihan kepemimpinan politik.
- c. Mencapai kesetaraan politik.
- d. Stabilitas politik.
- e. Akuntabilitas politik.
- f. Ketanggapan terhadap kebutuhan publik.

Selanjutnya menurut Moh. Ryaas Rasyid (dalam Yusoff dan Yusran 2007 : 40) Desentralisasi juga dipandnag oleh banyak sarjana sebagai arena pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara.

Desentralisasi memiliki aspek positif karena ia memungkinkan masyarakat tempat menjalankan latihan kepemimpinan sebelum menjadi salah satu aktor politik di tingkat nasional (Agus Yusoff dan Andi Yusran 2007 : 40)

2.1.3 Pemerintah Desa

Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang artinya adalah tempat asal, dan tempat tinggal, negarai asal mereka yang beranjak pada sebuah kesatuan kehidupan manusia, dengan adanya nilai-nilai norma kehidupan, dan mempunyai batasan yang cukup jelas. Kemudian Soetardjo (dalam Rahyunir dan Maulidiah 2015 : 9) mengatakan sesuai dengan definisi tersebut, di negara indonesia banyak ditemukan kesatuan masyarakat dengan sebutan nama daerahnya masing-masing beragam sebutan seperti Dusun dan Marga sebutan bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, kemudian sebutan Dati untuk masyarakat daerah wilayah Maluku, selanjutnya Nagari sebutan untuk masyarakat Minang tau Wanua di wilayah Minahasa. Dan sebutan untuk daerah lain, juga memiliki sebutan tersendiri baik secara mata pencarian mereka maupun adat istiadatnya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Wasistiono dan Tahir (2006 : 1) menyatakan keberadaan desa “kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan system pemerintahan mulai dari Pemerintahan Pusat, Daerah, dan Desa maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konstalasi pemerintahan. Padahal desalah yang menjadi pertautan terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama”.

Jika dilihat penjelasan di atas oleh Wasistiono dan Tahir terlihat bahwa keberadaan pemerintahan Desa berada posisi akhir dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dalam hal ini pemerintah desa perlu diberikan perhatian dan bimbingan oleh pemerintahan diatasnya agar pemerintahan desa juga mempunyai arah dan kekuatan dalam mengelola otonomi desa serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 1) mengatakan bahwa Desa dan Kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum,

sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas – batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Pengertian lainnya tentang Desa dinyatakan oleh pemerhati tentang desa lainnya yakni Bouman dan Baratha, menurut pandangan Bouman dalam Baratha sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir (2006 : 8) yang menyebutkan “Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak bebrapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”

Dan kemudian Bintarto juag memberikan pandangan (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 9)ia memandang desa dari segi geografi mendefinisikan desa sebagai “suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain”.

Kemudian, masih menurut Bintarto, unsur – unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah :

Pertama daerah, dalam arti tanah – tanah yang produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. *Kedua* penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat. *Ketiga* tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan – ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa (*rural society*).

Ketiga unsur ini tidak terpisah melainkan ada keterikatan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Unsur daerah, penduduk dan tata kehidupan merupakan satu kesatuan hidup atau “*living unit*”. Maju mundurnya desa tergantung pada tiga unsur ini yang dalam kenyataan ditentukan oleh faktor usaha manusia (*human effort*) dan tata geografis (*geographical setting*). Suatu daerah dapat berarti bagi penduduk apabila ada “*human effort*” untuk memanfaatkan daerahnya. Tiap – tiap daerah mempunyai “*geographical setting*” dan “*human effort*” yang berbeda-beda, sehingga tingkat kemakmuran dan tingkat kemajuan penduduk tidak sama.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha (dalam Nurcholis 2011 : 4) “Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya”

Selanjutnya Ter Haar (dalam Nurcholis 201 : 16) juga memberikan pandangan lainnya tentang konsep desa yaitu desa adalah “satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat memiliki yang memiliki benda-benda material maupun immaterial (geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materiële vermogen)”.

Kemudian dalam Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan pengertian “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan Sunardjo juga memberikan penjelasan tentang desa (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 10) ia menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”. Selanjutnya, masih menurut Sunardjo, susunan desa – desa membentuk persekutuan masyarakat hukum dikategorikan atas 3 (tiga) tipe yaitu :

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan kepada teritorial/wilayah tempat bersama sebagai dasar utama;
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan kesamaan keturunan/genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut;
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 73) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa;
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
 1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 2. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain;
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, lembaga Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (dalam Nurcholis 2011 : 77).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. (dalam Nurcholis 2011 : 78)

2.1.4 Indek Desa Membangun

Penggunaan istilah “pembangunan Desa” atau “Desa membangun” merupakan pilihan paradigmatis yang sarat makna. Pengakuan dan penghormatan Negara kepada Desa yang disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara penuh sebagaimana mandat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, memberikan tanda yang jelas bahwa dari situlah Desa harus menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia. Adapaun Visi Desa Membangun Indonesia adalah irisan sinergis antara Catur Sakti dan Tri Sakti yang merupakan pengejawantahan operasional Nawa Cita Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini Catur

Sakti diartikan sebagai desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi. Cita-cita tersebut memberikan arah yang jelas kepada pemerintah untuk hadir dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi menuju terciptanya Desa Mandiri. Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas mengendalikan dan mendikte, melainkan untuk memicu kreativitas asli Desa secara emansipatoris serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum mampu diselenggarakan sendiri oleh Desa. (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015)

Indeks Desa Membangun (IDM) meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga desa mampu nantinya untuk mandiri dalam pengelolaan wilayah pedesaan.

Dalam hal ini sebagaimana juga terlampir dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, dijelaskan maksud dari kategori desa tertinggal, desa berkembang, maju dan mandiri.

Pengertian kategori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kategori Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

2. Kategori Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

3. Kategori Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

4. Kategori Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

5. Kategori Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

Tabel. II.2 Klasifikasi Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun

No	Klasifikasi Desa	IDM
1.	Desa Mandiri	> 0,8155
2.	Desa Maju	$\leq 0,8155$ dan $> 0,7072$
3.	Desa Berkembang	$\leq 0,7072$ dan $> 0,5989$
4.	Desa Tertinggal	$\leq 0,5989$ dan $> 0,4907$
5.	Desa Sangat Tertinggal	$\leq 0,4907$

Sumber : Permendes, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 2016

Selanjutnya, untuk dapat mengetahui nilai IDM dari suatu desa tertentu, dapat diketahui dengan menggunakan rumus yaitu IDM merupakan akumulasi dari jumlah Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang kemudian hasil akumulasi tersebut dibagi tiga (3) $IDM = (IKS + IKE + IKL) / 3$.

Kemudian untuk melihat nilai dari ketiga indeks ketahanan diatas, maka dapat dilihat dari berbagai indikator. Indikator bentuk dasar untuk mendapatkan hasil setatus desa tersebut. Diantaranya adalah :

Tabel. II.3 Penilaian Indeks Ketahanan Desa

No	Indeks Ketahanan	Indikator	Penilaian
1.	Indek Ketahanan Sosial	a. Bidang Kesehatan	1. Pelayanan Kesehatan 2. Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan 3. Jaminan Kesehatan
		b. Bidang Pendidikan Akses	1. Akses Pendidikan Non Formal

		Pendidikan Dasar dan Menengah	2. Akses ke Pengetahuan Umum
		c. Bidang Modal Sosial	1. Memiliki Solidaritas Sosial 2. Memiliki Toleransi 3. Rasa Aman Penduduk 4. Kesejahteraan Sosial
		d. Bidang Permukiman	1. Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak 2. Akses ke Sanitasi 3. Akses ke Listrik 4. Akses Informasi dan Komunikasi
2.	Indeks Ketahanan Ekonomi	Bidang Ekonomi	i. Keragaman Produksi Masyarakat Desa ii. Tersedia Pusat Pelayanan Perdagangan iii. Akses Distribusi/Logistik iv. Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan v. Lembaga Ekonomi vi. Keterbukaan Wilayah
3.	Indeks Ketahanan Lingkungan	Bidang Lingkungan	2. Kualitas Lingkungan 3. Potensi Rawan Bencana dan tanggap bencana

Sumber : Permendes, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi 2016

2.1.5 Pembangunan Desa

Pada hakekatnya pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Perkembangan atau pembangunan masyarakat sebagai proses perubahan menunjukkan beprosesnya masyarakat yang semakin dewasa dalam merespons sebagai persoalan yang juga semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan itu sendiri. (Soetomo 2009 : 22)

Dalam pengertian ini terkandung makna kapasitas masyarakat yang semakin meningkat yang kemudian membawa dampak pada peningkatan taraf

hidupnya. Peningkatan kapasitas di sini termasuk meningkatkan dorongan dari dalam diri masyarakat untuk berubah semakin baik, kapasitas untuk mengidentifikasi sumber daya, potensi dan peluang serta memanfaatkannya, dan kapasitas untuk merespons sebagai tantangan yang muncul.

Soetomo Dalam bukunya Pembangunan Masyarakat (2009 : 25) memberikan empat asumsi sebagai konsep dasar pembangunan masyarakat adalah *Pertama* Perkembangan atau pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan. *Kedua* Perkembangan atau pembangunan masyarakat adalah proses semakin terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumber daya dan peluang. *Ketiga* perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas masyarakat untuk merespon sebagai persoalan yang berkembang. *Keempat* perkembangan atau pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimesni.

Kemudian Menurut Effendi (2002:2) pembangunan adalah “suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan”. Dalam hal ini tentu dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menjadi posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran masyarakat akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Rogers (dalam Agus Suryono 2001: 132) pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu

masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Adapun pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat seperti yang dimaksud berupa prasarana perhubungan wilayah pedesaan yaitu jalan, jembatan dan lain-lainnya, kemudian prasarana pemasaran yaitu gedung dan pasar, prasarana sosial yaitu seperti gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan puskesmas selanjutnya seperti prasarana produksi saluran air.

Dalam hal ini jelas bahwa pembangunan itu mengarah kepada proses perubahan yang lebih baik memberikan dampak sebuah keadilan, terwujudnya sebuah pembangunan yang baik tidak terlepas dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya.

Kemudian Edi Suharto mengsederhanakan ada 3 rumus utama yang mesti dilakukan sebuah negara dalam Pembangunan Nasional yakni :

1. Pertumbuhan Ekonomi (*economy growth*)

Fungsi pertumbuhan ekonomi mengacu pada bagaimana melakukan

“wirausaha” (misalnya melalui industrialisasi, penarikan pajak)

guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk

membiayai kegiatan pembangunan.

2. Perawatan Masyarakat (*community care*)

Fungsi perawatan masyarakat menunjuk pada bagaimana

merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam

risiko yang mengancam kehidupannya (misalnya menderita sakit, terjerembab kemiskinan atau tertimpa bencana alam dan sosial).

3. Pengembangan Manusia (*human development*)

Fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menjamin tersedianya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan.

Dalam pengembangan pembangunan wilayah pedesaan Febrian (2018) mengatakan pembangunan perdesaan itu harus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan ketrerkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan sosial capital dan human capital yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dan dalam perspektif terkini pembangunan ekonomi lokal yang menekankan bahwa pengembangan ekonomi lokal harus didorong oleh inisiasi lokal, dengan mamadukan aktor-aktor lokal secara bersinergi, meliputi pemerintah daerah, sektor swasta khususnya pengusaha lokal, universitas, asosiasi industri dan lainnya, dengan tujuan utama untuk membangun suatu daya saing dan kesempatan kerja yang berkelanjutan pada wilayah tersebut. (Febrian : 2018)

Kemudian kata Febrian (2018) kegiatan pembangunan itu mestinya harus mampu merangsang proses pemandirian masyarakat (*self sustaining process*). Dan ada hipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut.

Lain hal dengan Mulianto (2018) menurutnya pembangunan itu mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (commuinity/group).

Mulianto (2018) juga menambahkan Pembangunan desa sebaiknya dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasaranaprasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Kemudian pendapat Woolcock dan Naraya (dalam Mulianto ; 2018), ada beberapa aspek-aspek yang penting dalam pembangunan desa menuju kesejahteraan sosial antara lain:

1. Memperkuat lembaga desa dan masyarakat desa melalui pembangunan partisipatif.
2. Menganalisis modal sosial masyarakat desa melalui riset mendalam dengan berlandaskan indikator-indikator modal sosial
3. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menopang dan melakukan pembangunan dari perencanaan hingga pada pelaksanaan, pada semua sektor pembangunan baik fisik maupun sosial.
4. Membangun jaringan yang lebih luas sebagai bentuk pengembangan modal sosial masyarakat yang berdampak pada perluasan pencapaian kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.6 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (Kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadi proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal *Pertama* Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. *Kedua* Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Menurut Parsons, et.al. (dalam Suharto 2010 : 58-59) pemberdayaan adalah suatu bentuk proses dengan mana orang-orang bisa terlibat serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk pengawasan maupun pengontrolan serta hal-hal yang akan terjadi mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan merupakan

sebuah proses penekanan kepada kepribadian seseorang untuk mampu mewujudkan sebuah keterampilan dan keahlian yang dapat mempengaruhi perhatian di wilayah ia tinggal atau di lingkungan tempat ia tinggal.

Lain hal pengertian dari pendapat Swift dan Levin mereka memberikan pengertian (dalam Suharto 2010 : 59) bahwa pemberdayaan bagaimana bentuk usaha untuk mendapatkan kekuasaan kembali dengan cara tertentu.

Adapun menurut Rappaport (dalam Suharto 2010 : 59) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Sedangkan menurut Kieffer (dalam Suharto 2010 : 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.

Berbeda dengan Parsons, et.al ia juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan (dalam Suharto 2010 : 63) dimensi *pertama* Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Dimensi *kedua* sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. Dan dimensi *ketiga* pembahasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.

2.1.7 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah hal penting untuk menentukan sebuah keberhasilan pembangunan secara nasional dan sebagiannya pembangunan wilayah pedesaan, karena kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam sebuah perencanaan pembangunan nasional.

Menurut Marwansyah, bahwa manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karier, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hubungan industrial. (dalam Kulla, Rumapea, dkk. 2018)

Kemudian menurut Marihot Tua Efendi Hariandja, ia mengatakan manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan

merangsang, mengembangkan, memotivasi dan memelihara kinerja yang tinggi dalam organisasi. (dalam Kulla, Rumapea, dkk. 2018)

Hal lain pula yang dikemukakan oleh John B. Miner dan Mary Green Miner manajemen sumber daya manusia dalam Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai suatu proses pengembangan, penerapan, dan menilai kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, metode-metode dan program-program yang berhubungan dengan individu karyawan dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja. (dalam Kulla, Rumapea, dkk. 2018)

Selanjutnya sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndaraha adalah sumber daya manusia yang menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitifgeneratif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence*, *creativity* dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan air, tenaga, otot dan sebagainya. Dalam (dalam Kulla, Rumapea, dkk. 2018)

Disamping itu menurut Sugeng bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. (dalam Kulla, Rumapea, dkk. 2018)

2.1.8 Organisasi

Menurut Zulkifli (2005 : 74) bahwa konsep organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerjasama, dan mencakup rangkaian aktifitas pembagian tugas,

penunjukan staf pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian organisasi.

Chester Benard (dalam Dedeh dan Djaenuri 2012 : 5) mengemukakan bahwa “organisasi ada kalau orang-orang berhubungan satu sama lain, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Sedangkan Weber, yang dikutip oleh Sedarmayanti (dalam Dedeh dan Djaenuri 2012 : 5) “organisasi adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan, yang membagi di antara mereka praktik-pratik dari fungsi tersebut yang siap melayani untuk praktik mereka”.

Selanjutnya Gibson, et al, (dalam Dedeh dan Djaenuri 2012 : 5) berpendapat bahwa “Organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama”.

Adapun menurut Stephen P. Robbins (dalam Dedeh dan Djaenuri 2012 : 5) “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang relative jelas, yang berfungsi secara realatif teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian tujuan”

Lalu Jones menyatakan (dalam Dedeh dan Djenuri 2012 : 5-6) “Organisasi adalah sebagai sarana atau alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan tindakannya guna mewujudkan sesuatu atau nilai yang mereka harapkan, yaitu tujuan organisasi”.

Dari pendapat ahli di atas maka implikasinya adalah :

- a. organisasi berkenaan dengan efisiensi dalam mencapai tujuan;
- b. organisasi merupakan suatu system sosial dimana terjadi interaksi antara anggotanya;
- c. organisasi dibentuk untuk menumpuk kekuatan dalam menghadapi lingkungan;
- d. organisasi berkenaan dengan system hierarki yang mengatur dan mengekang kebebasan;
- e. organisasi melayani kepentingan sekelompok orang;
- f. organisasi adalah alat mendominasi orang lain;
- g. organisasi menginstitusionalisasikan norma dan nilai untuk tujuan tertentu;
- h. secara keseluruhan organisasi merupakan alat yang melahirkan sikap dan perilaku struktural;
- i. dalam kehidupan sehari-hari alat ini telah mendorong pencapaian tujuan yang kompleks, mendorong dan menangkai gangguan dari luar organisasi, tetapi juga sekaligus menimbulkan hambatan struktural bagi manusia. (Dedeh dan Aries 2012 : 6)

Sedangkan pengertian struktural organisasi menurut Robbins (dalam Dedeh dan Aries 2012 : 6) adalah menetapkan “bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal, serta pola interaksi yang akan diikuti”. Selanjutnya Gibson, dkk (dalam Dedeh dan Aries 2012 : 6) “Struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan”.

Menurut Robbins (dalam Febrian : 2018) komunikasi memiliki empat fungsi utama dalam suatu organisasi atau dalam kelompok tertentu, fungsi organisasi adalah :

1. Fungsi pengawasan
2. Fungsi motivasi
3. Fungsi pengungkapan emosional
4. Fungsi Informasi

2.1.9 Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki posisi sangat strategis dalam pembangunan baik dilihat dari

kondisi geografis, geoekonomi, dan geopolitik memiliki peluang menjadi kawasan yang berperan penting dimasa yang akan datang terutama dijalur perdagangan dan ekonomi internasional. (Febrian : 2018)

Suka Margasatwa Bukit Rimbang Baling adalah satu kawasan hutan lindung yang keberadaanya ada di wilayah provinsi riau. Melalui Keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau Nomor 149/V/1982 tanggal 21 Juni 1982 tentang Penunjukan Area Hutan di Sekitar Bukit Rimbang Baling sebagai kawasan Hutan Tutupan/Suka Alam seluas 136.000 hektar. Kemudian Menteri Kehutanan Penetapan Keputusan Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbnag Baling Nomor SK. 3977/ Menhut-VII/KUH/2104 seluas 141.226,25 hektar di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Bukit Rimbang Baling ditunjuk sebagai kawasan suaka alam dikarenakan areal hutan di sekitar Bukit Rimbang Baling memiliki fungsi suaka margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya, untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi. (BBKSDA 2015)

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan, kayu-kayu besar, yang menempati daerah yang cukup luas. Hutan banyak fungsi dan manfaat yang harus dilindungi serta di jaga keberadaannya sebagai sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup di muka bumi. Hutan mempunyai peran penting sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.(Febrian 2015)

Suaka margasatwa adalah kawasan suka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling memiliki karakteristik yang khas yaitu hutan hujan dataran rendah dan keanekaragaman hayati tinggi dengan berbagai jenis satwa langka yang terancam punah seperti harimau sumatera (*Panthera Tigris Sumataa*). (BBKSDA 2015)

Kawasan ini dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta kordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial di Pronvinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/MenLHK/Sekjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. (BBKSDA 2015)

Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling juga dihuni oleh masyarakat lokal tempatan yang sudah turun-temurun mengelolah sumberdaya alam untuk mendukung kehidupan mereka. Masyarakat asli yang ada umumnya berasal dari suku Melayu dan percampurannya dengan Minangkabau. Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling juga sebagai batas peralihan antara budaya Melayu dan Minangkabau. Keberadaan masyarkat di dalam maupun sekitar kawasan memiliki dua peranan, mereka dapat mendukung upaya pengelolaan dan pelestarian

kawasan maupun sebaliknya. Sebelum pengesahan keputusan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling pada tahun 1982, daerah ini telah berisi masyarakat adat yang mengandalkan hutan untuk kehidupan. Catatan adanya pemukiman dan desa-desa sebelum pengesahan status Suka Margasatwa, telah ada sejak zaman kerajaan. (BBKSDA 2015)

2.1.10 Strategi

Strategi merupakan rangkaian kegiatan, yang membutuhkan keseriusan dan kesungguhan dalam melaksanakannya. Dengan perencanaan yang matang agar tujuan dari strategi yang telah dibentuk tercapai. Melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam suatu daerah merupakan bentuk langkah dan kunci untuk menghasilkan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan maupun wilayah suatu daerah.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* dan *strategia*. Dalam strategi terdapat dua pengertian yaitu untuk menunjukkan kepada apa yang mau dilakukan oleh suatu organisasi secara aktif atau untuk menggambarkan reaksi positifnya terhadap perubahan lingkungan. Istilah strategi yang dipakai dalam studi berarti pengetahuan dan seni menangani sumber-sumber yang tersedia dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan. (Chandradhy dan Denia dalam, Hendarji 2019).

Menurut Pearce dan Robinson menyatakan bahwa manajemen strategi sebagai kumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran -sasaran organisasi. (dalam, Hendarji 2019)

Kemudian Pearce dan Robinson menjelaskan ada tiga bahan pokok sangat penting bagi keberhasilan suatu strategi, *pertama* itu ialah strategi harus konsisten dengan kondisi lingkungan persaingan. Tegasnya, strategi harus memanfaatkan peluang yang ada atau diperkirakan akan ada dan meminimalkan dampak dari ancaman-ancaman besar, yang *Kedua* strategi harus realistis dalam hal kemampuan intern organisasi. Akhirnya pemanfaatan peluang haruslah didasarkan tidak hanya pada adanya peluang itu sendiri melainkan juga pada kekuatan intern organisasi dan yang *ketiga* strategi harus dilaksanakan secara cermat. (dalam, Hendarji 2019)

Selanjutnya Koteen dalam Salusu mengungkapkan bahwa dalam strategi terdapat beberapa tipe-tipe strategi, diantaranya yaitu:

a. Corporate Strategy (strategi organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk apa.

b. Program Strategy (strategi program)

Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

c. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya)

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

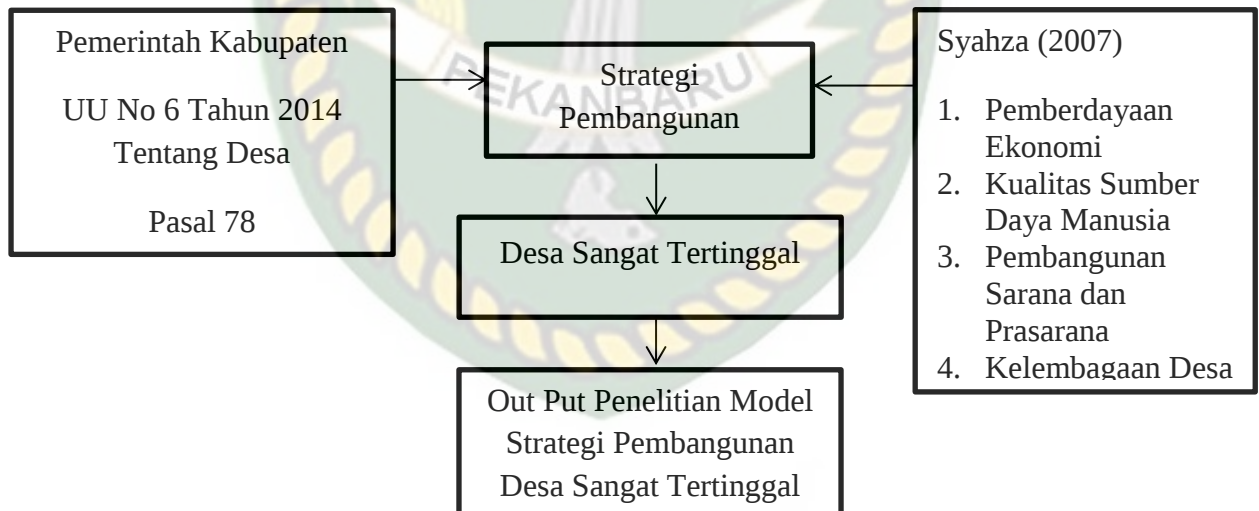
d. Institutional Strategy (strategi kelembagaan)

Fokus dari strategi institutional ialah mengembangkan kemampuan organisasional untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. (dalam, Hendarji 2019)

2.2 Kerangka Pikir

Adapun Kerangka Pikir terkait dengan proposal penelitian skripsi dengan judul “Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar ”. Penulis sajikan seperti pada gambar berikut :

Gambar. II.1 Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar



2.3 Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang di pergunakan, adapun konsep-konsep yang di gunakan sebagai berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam rangka mencapai tujuan yang sama
5. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.
6. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
7. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan

masyarakat.

8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.
9. Pembangunan adalah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.
10. Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
11. Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuhnya dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

2.4 Operasional Variabel

Tabel II.4 Operasional Variabel Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Syahza (2007) pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan.	Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar	1. Pemberdayaan Ekonomi 2. Kualitas Sumber Daya Manusia 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana 4. Kelembagaan Desa	a. Kesejahteraan b. Pemeberian Peluang Usaha e. Kualitas Fisik dan Kesehatan f. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan) a. Perencanaan b. Realisasi dari Pembangunan Sarana dan Prasana a. Pembentukan Lembaga Formal b. Pembentukan Lembaga Non Formal

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian sangat penting menjelaskan tipe penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti berfikir penelitian ini akan sangat tepat jika penelitian ini menggunakan tipe penelitian "*Kualitatif*". Metode penelitian "*Kualitatif*" adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif yang cocok menggunakan Analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Landasan teori dijadikan sebagai dasar serta pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dalam Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah desa yang berstatus Sangat Tertinggal di antaranya yaitu Desa Gajah Bertalut, desa ini adalah bagian dari 8 desa yang berada dalam kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling.

3.3 Key Informan dan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial sebagai sumber yang akan menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena sebagaimana sudah dijelaskan pada BAB Pendahuluan, dan Key Informan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok maka peneliti menetapkan subjek penelitian ialah sebagai berikut :

Tabel III.1 Tabel Key Informan dan Informan

No	Subjek Penelitian	Informan	Key Informan	Ket
1.	Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar	-	1	-
2.	Kepala Desa Gajah Bertalut	1	-	-
3.	Staf Desa Gajah Bertalut Bidang Admin Kantor Desa	1	-	-
4.	Ketua Pemuda Desa Gajah Bertalut	1	-	-
5.	Masyarakat Desa Gajah Bertalut	3	-	-

Sumber : Modifikasi Peneliti 2019

Dari tabel di atas tidak menutup kemungkinan juga informan akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Hal ini berdasarkan teknik penarikan informan sebagaimana yang akan di jelaskan dalam poin setelah ini.

Oleh karena tabel diatas, maka penulis untuk sementara menetapkan Dinas Pemeberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar sebagai subjek utama untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi daerahnya sebagai Key-Informan dari penelitian dengan Judul “Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar ”

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “*Snow Ball*”. Teknik ini yaitu dengan menetapkan beberapa orang menjadi informan dan

selanjutnya jika informan yang telah ditetapkan belum memenuhi kebutuhan atau jawaban yang didapatkan masih simpang siur, maka informan ini akan bertambah sampai data yang diinginkan peneliti sudah mencukupi atau sudah sesuai dengan yang diharapkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisioner. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip, dan buku – buku, sumber tersebut dapat berupa literatur – literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang akurat agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui kondisi atau

keadaan serta hal – hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen – dokumen atau arsip dan mengambil gambar-gambar dari dokumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun alasan penulis melakukan berbagai cara pengumpulan data sebagaimana penulis jelaskan diatas, agar penulis dapat mengumpulkan data yang lebih baik. Dengan Melihat, Bertanya dan Membaca maka penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis menggunakan berbagai cara mengumpulkan data sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

3.6 Teknik Analisa Data

Data – data yang diperoleh dari informan dilapangan harus di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya akan sangat dibutuhkan jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini berguna agar ada keseriusan peneliti dalam mengejar target yang telah peneliti tentukan tersebut.

Tabel III.2 Jadwal Penelitian Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan dan Minggu)																							
		Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Mei 2019				Juni 2019				Juli 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
2	Seminar Usulan Penelitian									X															
3	Perbaikan Usulan Penelitian										X	X													
4	Penyusunan Daftar Wawancara													X											
4	Penelitian Lapangan														X										
5	Analisis Data														X										
6	Penyusunan Laporan Penelitian															X	X								
7	Ujian Skripsi																	X							
8	Perbaikan Skripsi																		X	X	X				
9	Penggandaan Skripsi																					X	X	X	

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat

Sejarah menggambarkan kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari masa-kemasa. Dari sejarah berbagai peristiwa terjadi pada masa lalu secara terus menerus terjadi perubahan, pada masa kini sejarah dipahami oleh generasi penerus dari kehidupan terdahulu sebagai suatu cerminan untuk menuju kemajuan-kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini peneliti menggambarkan bentuk sejarah singkat lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di wilayah daerah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar Kiri Hulu di Desa Gajah Bertalut adalah sebagai objek dalam penelitian ini.

4.1.1 Keadaan Provinsi Riau

Provinsi Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatra. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatra, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Sebelah Utara provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau

Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatra dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Provinsi riau memiliki nama ibu kota yaitu Pekanbaru riau yang merupakan ibu kota besar yang ada di provinsi riau. Selain pekanbaru ada juga ibu kota besar lainnya diantaranya ialah kota Dumai, Selatpanjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang, Tembilahan, dan Rengat. Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat.

Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota yang memiliki nama ibu kota yang berbeda setiap daerahnya. Di antaranya adalah.

Tabel. IV.1 Nama-nama Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten	Pusat Pemerintahan/ Ibu Kota	Luas Wilayah	Jumlah Kecamatan
1.	Bengkalis	Bengkalis	6.975,41	11
2.	Indragiri Hilir	Tembilahan	12.614,78	20
3.	Indragiri Hulu	Rengat	7.723,80	14
4.	Kampar	Bangkinang	10.983,47	21
5.	Kepulauan Meranti	Selatpanjang	3.707,84	9
6.	Kuantan Singingi	Taluk Kuantan	5.259,36	15
7.	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	12.758,45	12
8.	Rokan Hilir	Bagan Siapi-api	8.881,59	15
9.	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	7.588,13	16
10.	Siak	Siak Sri Indrapura	8.275,18	14
11.	Dumai	Dumai	1.623,38	7
12.	Pekanbaru	Pekanbaru	632,27	12

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Dari tabel 12 kabupaten/kota di atas keberadaan objek penelitian oleh peneliti berada dalam wilayah Kabupaten Kampar dengan Nama Ibu Kota

Bangkinang, dan keberadaan kabupaten kampar juga menjadi lintasan transportasi utama dari wilayah Riau lainnya menuju ke Provinsi Sumatera Barat.

4.1.2 Keadaan Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah kabupaten yang keberadaan wilayahnya di Provinsi Riau dan memiliki julukan sebagai "negeri serambi Makkah". Julukan lainnya yang juga diberikan kepada kabupaten yang beribu kota di Kota Bangkinang ini adalah "bumi sarimadu". Secara garis lintang, kabupaten ini terletak pada 1°00'40" LU sampai 0°27'00" LS dan 100°28'30" – 101°14'30" BT. Sama seperti kabupaten lain di Riau, Kampar memiliki iklim tropis, dengan suhu rendah terjadi pada bulan November dan Desember dengan capaian sebesar 21 °C, sementara cuaca memanas terjadi pada bulan Juli dengan suhu sekitar 35 °C.

Bangkinang adalah sebagai ibu kota Kabupaten Kampar terletak hampir di tengah wilayah kabupaten yang menjadi kekuatan daerah untuk melakukan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan memberi kemudahan bagi kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Bangkinang juga menjadi lintasan transportasi utama dari wilayah Riau kedaerah provinsi lainnya yaitu menuju ke Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah dimana sebelah utara berbatasan Kabupaten Kampar berdekatan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu, untuk sebelah selatan berbatasan kabupaten kampar berdekatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, disebelah barat berbatasan Kabupaten Kampar berdekatan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera barat, dan untuk sebelah timur

berbatasan Kabupaten Kampar berdekatan dengan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah cukup besar dibanding kabupaten lainnya yang ada di Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas daerah sebesar 10.928,20 km². Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan yang dipadati penduduk secara total sebesar 783.248 Jiwa.

Tabel. IV.2 Nama-nama Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Kampar

No	Nama Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Bangkinang	Bangkinang	4
2.	Bangkinang Barat	Kuok	9
3.	Bangkinang Seberang	Muara Uwai	9
4.	Kampar	Air Tiris	18
5.	Kampar Timur	Kampar	9
6.	Kampar Utara	Desa Sawah	8
7.	Salo	Salo	6
8.	Rumbio Jaya	Teratak	7
9.	Kampar Kiri	Lipat Kain	20
10.	Kampar Kiri Hilir	Sei Pagar	8
11.	Kampar Kiri Hulu	Gema	24
12.	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	11
13.	Siak Hulu	Pangkalan Baru	12
14.	Gunung Sahilan	Kebun Durian	9
15.	Perhentian Raja	Pantai Raja	5
16.	Tambang	Sei Pinang	17
17.	Tapung	Petapahan	25
18.	Tapung Hilir	Pantai Cermin	16
19.	Tapung Hulu	Sinama Nenek	14
20.	XIII Koto Kampar	Batu Besurat	13
21.	Koto Kampar	Tanjung	6

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar

Dari tabel di atas Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan nama Ibu Kota Kecamatan Gema dengan memiliki jumlah desa terbanyak nomor 2 dari Kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar. Keberadaan desa-desa di Kecamatan

Kampar Kiri Hulu memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari perkotaan serta keberadaanyapun terisolir, bahkan sebagian dari desa berada dalam kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4.1.3 Keadaan Desa Gajah Bertalut

Desa Gajah Bertalut pada awalnya adalah sebuah perkampungan kecil yang di huni hanya beberapa kepala keluarga, konon katanya berkisar tahun 1890 kampung Gajah Bertalut didirikan oleh “Datuk Gagak” yang datang dari Pagaruyuang Minangkabau (Sumatera Barat). Pada awalnya Kampung Gajah Bertalut bernama Koto Tuo, yang bertempat disebelah timur Desa Gajah Bertalut sekarang, tetapi tidak beberapa lama tinggal disana, mereka pindah ke Koto Tongah disebelah barat desa sekarang, dari situ mereka hidup tidak beberapa tahun konon katanya mereka diserang oleh penyakit dan merekapun pindah ketempat lain.

Berkisar Tahun 1901 kampung Gajah Bertalut di huni hanya 30 kepala keluarga yang Bernaung dibawah Kerajaan Gunung Sailan. Setelah Indonesia merdeka, kampung Gajah Bertalut menjadi sebuah dusun yang berinduk desa kepada Desa Batu Sanggan, Dusun IV dari empat dusun di Batu Sanggan. Setelah 20 tahun kemudian, desa Batu Sanggan dipisah menjadi dua bagian yaitu Gajah Bertalut dengan Tanjung Beringin membuat satu kasatuan desa pecahan Batu Sanggan dan berinduk desa ke Desa Tanjung Beringin, berkisar 2-4 tahun lamanya.

Pada tahun 2002 Desa Gajah Bertalut pecah dari Desa Tanjung Beringin dan menjadi sebuah desa defenitif, dengan Kepala Desa PJS ILYAS.B dan

Sekretaris Desa HERMAN. Kemudian Tahun 2006 Masyarakat Desa Gajah Bertalut memilih secara demokrasi Kepala desa baru, yaitu dengan SAHRIAL sebagai kepala Desanya. Desa Gajah Bertalut berada di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan wilayahnya termasuk dalam kawasan Bukit Rimbang Baling yaitu kawan hutan lindung.

Pemimpin Adat (pemangku adat) Desa Gajah Bertalut sejak berdirinya antara lain :

Tabel. IV.3 Nama-nama Pemangku Adat Desa Gajah Bertalut

No	Nama Pemangku Adat	Tahun
1.	Datuak Laksimano Boncar	1960
2.	Datuak Pucuak Nudin	1965
3.	Datuak Pucuak Marin	1970
4.	Datuak Pucuk Jamaludin	1975
5.	Datuak Pucuk Bota	1980
6.	Datuak Pucuak Mak Isa	1985
7.	Datuak Pucuk Bahar T	1990
8.	Datuk Pucuk Badul Aziz	1995
9.	Datuk Pucuk Tarmizi	2000
10.	Datuk Pucuk Tarmizi	-

Sumber : *Profil Desa Gajah Bertalut 2018*

Tabel diatas adalah nama pemangku Adat Desa Gajah Bertalut dari tahun ke tahun, yang membawa sejarah dan sehingga terbentuk desa gajah bertalut di daerah Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Sebelum adanya Kepala Desa pemangku adatlah yang menjadi kepala masyarakat diwilayah pedesaan, dan sehingga sekarang pemaku adat juga masih terbentuk untuk menjaga peninggalan-peninggalan serta kebudayaan yang telah ditinggalan oleh nenek moyang mereka.

4.1.3.1 Demografi

Batas wilayah merupakan sesuatu hal yang penting, untuk mengetahui batas wilayah administrasi pemerintah atar Desa dan megetaui luas wilayah

dimiliki oleh setiap desa. Dibagian Sebelah Utara Desa Gajah Bertalut berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin, untuk Sebelah Selatan Desa Gajah Bertalut berbatasan dengan Desa Petai, dan di Sebelah Barat Desa Gajah Bertalut berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin, di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aur Kuning.

Kemudian untuk melihat batasan luas kewilayahan yang dimiliki desa gajah bertalut bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.4 Luas Wilayah Desa Gajah Bertalut

No	Nama Wilayah	Luas Wilayah (HA)
1.	Pemukiman	10
2.	Pertanian Sawah	-
3.	Ladang/Perkebunan	2294
4.	Pemukaman	2.5
5.	Perkantoran	0.5
6.	Lapangan Olahraga	3
7.	Hutan Lindung	-
8.	Hutan Adat	4414
9.	Hutan Asli	2120
10.	Hutan Rakyat	2294
11.	Rawa-rawa	-

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dilihat dari tabel di atas luas wilayah Desa Gajah Bertalut hanya memiliki luas wilayah pemukimannya sekitar 10 hektare, dengan memiliki 2294 hektare wilayah perekebunan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Gajah Bertalut untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka. Dan memiliki 4414 hektare hutan adat, kewilayahan hutan adat tersebut adalah pemilikan secara bersama masyarakat desa dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat desa. luas kewilayahan hutan adat tersebut sudah termasuk dengan hutan asli dan hutan rakyat. Hal ini merupakan batasan-batasan wilayah yang boleh dikelola oleh

masyarakat desa gajah bertalut. kemudian selebihnya adalah keberadaan hutan lindung yang tidak bisa di ganggu kemudian keberadaanya harus dilindungi dan dijaga kelesatariannya. Hal ini masyarakat dan pemerintah desa tidak bisa memperluas kwilayahan dan hanya memanfaatkan lahan yang tersedia.

Kemudian orbitasi desa gajah bertalut atau jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat sekitar 25 KM dengan memakan waktu 2 jam, dan kemudian untuk jarak tempuh ke ibu kota kabupaten ada 135 KM dengan memakan waktu 5 jam untuk sampai ke ibu kota kabupaten kampar yaitu bangkinang, selanjutnya untuk menempuh ibu kota provinsi yaitu kota pekanbaru dengan jarak 150 KM dengan memakan waktu 6 jam. Dari jarak tempuh Desa Gajah Bertalut memiliki akses yang cukup jauh untuk menempuh ibu kota kecamatan dengan membutuhkan waktu 2 jam dengan jarak hanya 25 km, dan untuk akses menuju ke ibu kota kabupaten dan provinsi membutuhkan waktu 5 hingga 6 jam. Hal ini tentu menjadi perhatian dengan keberadaan Desa Gajah Bertalut karena keberadaanya jauh dari wilayah perkotaan atau pusat-pusat pemerintah daerah dan untuk menempuh ibu kota kecamatan saja hanya bisa melalui akses jalan air.

Adapun untuk jumlah penduduk masyarakat desa gajah bertalut berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat pada tabel dibawah :

Tabel. IV.5 Jumlah Penduduk Desa Gajah Bertalut Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Nama	Jumlah Jenis Kelamin	Jumlah KK
1.	Kepala Keluarga		132 Orang
2.	Laki-laki	239 Orang	
3.	Perempuan	245 Orang	
Total Jumlah Penduduk			484 Orang

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana jumlah kependudukan desa gajah bertalut, dengan letak wilayahnya yang jauh dari daerah perkotaan, hal ini Desa Gajah Bertalut hanya memiliki 132 kk dengan artian Desa Gajah Bertalut memiliki 132 kepala keluarga. Dari 132 kk dengan jumlah laki-laki 239 dan perempuan 245 orang, pemerintah desa dalam upaya pembangunan desa bisa melibatkan masyarakat dan bersama-sama mengerjakan pembangunan-pembangunan wilayah di desa.

4.1.3.2 Keadaan Sosial

Keadaan sosial adalah merupakan suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan bagaimana interaksi ataupun perbuatan manusia dalam berkehidupan ditempat ia tinggal. Dalam hal keadaan sosial masyarakat desa gajah bertalut dilihat dari berbagai bidang diantaranya disisi pendidikan, kesehatan, keagamaan, serta tersedianya air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dari sisi masyarakat yang memiliki pendidikan untuk tahun 2018, bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. IV. 6 Jumlah Masyarakat Yang Memiliki Pendidikan

No	Nama Pendidikan	Jumlah
1	SD/ MI	109 Orang
2	SLTP/ MTs	34 Orang
3	SLTA/ MA	56 Orang
4	S1/ Diploma	11 Orang
Total Jumlah Bependidikan		210 Orang

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Jika dilihat pada tabel di atas, masyarakat Desa Gajah Bertalut yang memiliki pendidikan perlu dipemberdayakan oleh pemerintah desa, dengan

memiliki 11 orang S1, pemerintah desa bertalut bisa memanfaatkan masyarakat yang mempunyai jejang pendidikan diperguruan tinggi, untuk membatu dan memberikan dorongan mengembangkan wilayah pedesaan dengan SDM di miliki oleh desa. Dari wawancara peneliti ada bentuk keluhan masyarakat di bidang penjagar pendidikan sekolah dasar yang belum memiliki pendidikan yang seharusnya menjadi pengajar, dengan adanya 11 orang memiliki sarjana S.1 pemerintah desa bisa memanfaatkan mereka menjadi pengajar di lembaga pendidikan sekolah dasar yang dimiliki oleh Desa Gajah Bertalut. dan mereka juga bisa memberikan kontribusi untuk bisa membuat suatu kegiatan yang bersifat membangun karakter dan moral masyarakat desa, pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan peran dan dukungannya. Adapun jumlah bangunan pendidikan yang dimiliki oleh desa gajah bertalut adalah sebagai berikut :

Tabel. IV.7 Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Gajah Bertalut

NO	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah Unit
1	Gedung MDA	1
2	SD/MI	1
3	SLTP/MTs	-
4.	SLTA/MA	-

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dilihat pada tabel diatas, lembaga pendidikan Desa Gajah Bertalut perlu ditingkatkan, dengan berbagai pembangunan yang perlu dilaksanakan, seperti pembangunan sarana pendidikan SLTP yang belum dimiliki oleh desa, hal ini dilakukan agar mampu untuk meningkatkan SDM masyarakat desa. Dengan hanya memiliki 1 lembaga pendidikan SD dan MDA, desa gajah betalut harus menjadi perhatian pemerintah desa dibidang SDM. Bagi anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat SLTP harus keluar dari wilayah pedesaan

dan ada dari mereka juga yang melanjutkan sekolah SLTP di desa tertangga yaitu desa Aur Kuinng. Dan jika mereka keluar dari wilayah pedesaan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hal ini tentu menjadi besarnya biaya sekolah.

Dibidang kesehatan masyarakat desa Gajah Bertalut terjadi penambahan pada jumlah penduduk, dilihat dari profil desa 2018 bahwa ada 25 orang bayi yang melahirkan untuk tahun 2018 saja, kemudian ada 1 orang bayi yang meninggal dunia, dengan demikian berarti ada 26 ibu yang melahirkan untuk tahun 2018. Dengan kelahiran bayi tersebut akan memberikan penambahan penduduk desa Gajah Bertalut setiap tahunnya. Dan untuk melihat bentuk kegiatan dan angka kesehatan bayi atau anak-anak masyarakat desa Gajah Bertalut bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV. 8 Kegiatan Kesehatan Desa Gajah Bertalut

No	Kegiatan Kesehatan	Jumlah
1.	Cukup Imunisasi Polio 3	5 Orang
2.	Cakupan Imunisasi DPT-1	3 Orang
3.	Cakupan Imunisasi Cacar	3 Orang
Total Jumlah Cakupan Imunisasi		11 Orang

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dari tabel diatas adanya 11 orang balita dengan gizi baik dengan diberikan cakupan imunisasi, hal ini menunjukkan pemerintah desa selalu memberi perhatian gizi kepada anak-anak agar kesehatan anak-anak masyarakat Desa Gajah Bertalut selalu terjaga. Namun jika dilihat pada angka jumlah bayi yang lahir tahun 2018, tidak semua mendapatkan imunisasi tersebut, ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa bagaimana imunisasi tersebut bisa teralisasi secara merata dengan jumlah anak-anak dan bayi yang ada di desa Gajah Bertalut.

Dan untuk ketersediaan air bersih masyarakat desa gajah bertalut, belum tersalurkan secara merata, karena sebagian kepala rumah tangga masih ada menggunakan air sungai. Hal bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.9 Pemenuhan Air Bersih Desa Gajah Bertalut

No	Penguna Air Bersih	Jumlah Penguna
1.	Sumur Galian	-
2.	Air Mata Air	-
3.	Sumur Pompa	-
5.	Sumur Hidran Umum	50 KK
6.	Air Sungai	82 KK
Total Jumlah Penguna Air Bersih		132 KK

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia. Didesa gajah bertalut hanya ada 50 kk yang menggunakan air bersih dari 132 kk, selebihnya memanfaatkan air sungai, potensi sumber daya alam yang ada Desa Gajah Bertalut dapat dikembagakan dan dirasakan oleh masyarakat setempat dengan adanya beberapa titik sumber mata air didesa gajah bertalut, maka pemerintah perlu melakukan penambahan pembangunan sumur hidran umum kemudian disalurkan kerumah-rumah masyarakat yang belum memiliki saluran air bersih.

Untuk pemeluk agama dan jumlah bangunan tempat ibadah desa gajah bertalut bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel. IV.10 Jumlah Pemeluk Agamaan dan Jumlah Tempat Ibadah
Desa Gajah Bertalut**

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Tempat Ibadah	Unit
1	Islam	484 Orang	Masjid	1
2	Katolik	-	Musholla	1
3	Kristen	-	Gereja	-
4	Hindu	-	Pura	-
5	Budha	-	Vihara	-

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dengan jumlah penduduk beragama islam pemerintah desa dan masyarakat bisa melaksanakan berbagai bentuk kegiatan keagamaan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan keagamaan kepada masyarakat desa. Dengan adanya fasilitas tempat ibadah masjid dan mushola dengan penduduk beragama islam masyarakat desa dan pemerintah desa bisa memanfaatkan masjid sebagai tempat kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut. Dengan tujuan untuk meningkatkan keilmuan keagamaan kepada masyarakat khusus kepada pemuda dan anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan.

4.1.3.3 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi merupakan satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, dari ekonomi manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Di desa gajah bertalut ada macam-macam jenis tumbuhan dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Namun hanya ada satu tumbuhan yang bisa dimanfaatkan dan dikelola masyarakat. Dalam hal ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.11 Pertanian dan Jenis Tanaman Di Desa Gajah Bertalut

No	Jenis Tanaman	Hektare (HA)
1.	Padi sawah	-
2.	Padi Ladang	-
3.	Jagung	-
4.	Palawija	-
5.	Tembakau	-
6.	Tebu	-
7.	Kakao/ Coklat	-
8.	Sawit	-
9.	Karet	2294
10.	Kelapa	-
11.	Kopi	-
12.	Singkong	-
13.	Lain-lain	-

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dilihat dari tabel diatas bahwa terlihat masyarakat Desa Gajah Bertalut hanya memanfaatkan hasil kebun karet saja, hal ini pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan pemerintah desa agar masyarakat tidak ketergantungan pada hasil karet. Dengan membentuk berbagai program yang akan membantu pada bidang perekonomian masyarakat desa gajah bertalut. Dan belum semua masyarakat desa gajah bertalut memiliki perkebunan karet tersebut.

Dari sisi peternakan, desa gajah bertalut cukup banyak memiliki jenis ternak dan kemudian bisa di kembangkan untuk sektor perekonomian masyarakat desa. Hal ini bisa dilihat pada tabel di berikut :

Tabel. IV. 12 Jenis dan Jumlah Ternak Desa Gajah Bertalut

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Kambing	10 Ekor
2.	Sapi	20 Ekor
3.	Kerbau	50 Ekor
4.	Ayam	125 Ekor
5.	Itik	20 Ekor
6.	Burung	10 Ekor
Total Jumlah Ternak		135 Ekor

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dilihat dari tabel diatas terdapat bermacam ternak dengan jumlah berbeda, seperti kambing, sapi, kerbau, ayam, itik, dan burung. Pemerintah desa dalam hal ini bisa memberdayakan potensi ternak yang dimiliki oleh masyarakat desa serta menyediakan lahan untuk pengembangan ternak tersebut, kemudian menyediakan penampungan untuk penjualan hasil peternakan.

Dilihat dari hasil perikanan, desa gajah betalu tidak memiliki tambak ikan dan udang secara khusus, namun jika dilihat keberadaan desa gajah betalut berada di tepi sungai, pemerintah desa dan masyarakat telah memanfaatkan hasil ikan

dari sungai, masyarakat telah membentuk pemanfaatan lubuk larangan yang menjadi budaya disana dan hasil tangkapan ikan dilelang dengan harga tertentu. Dan sebagian dari hasil tangkapan dibagikan kepada masyarakat. kegiatan ini juga dilakukan dengan hal sama dengan desa lainnya yang berada dalam kawasan.

Kemudian untuk melihat struktur mata pencarian masyarakat desa gajah bertalut, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.13 Struktur Mata Pencarian Masyarakat Desa Gajah Bertalut

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	210 Orang
2.	Pedagang	7 Orang
3.	PNS	-
4.	Tukang	5 Orang
5.	Guru	7 Orang
6.	Bidan/ Perawat	2 Orang
6.	TNI/ Polri	-
7.	Pesiunan	-
9.	Sopir/ Angkutan	-
10.	Buruh	5 Orang
11.	Jasa persewaan	-
12.	Swasta	32 Orang

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dilihat dari struktur mata pencarian masyarakat Desa Gajah Bertalut, banyak masyarakat bekerja di jenis pekerjaan Petani dengan angka 210 orang. Sedangkan untuk pekerja Swasta 32 orang. Hal ini menunjukkan tidak semua masyarakat Desa Gajah Bertalut memiliki pekerjaan tetap, dan hanya 7 orang pekerjaanya sebagai pedagang. Dan sisi keamanan belum memiliki aparat Kepolisian maupun TNI, pemerintah desa serta masyarakat dalam hal kemaamana dan ketentraman desa dengan menjaganya secara bersamaan serta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan kebudayaan yang berlaku di desa mereka. Dilihat dari kepegawaian mayarakat desa gajah betalut

belum memiliki orang yang berstatus PNS, hal ini menunjukkan bahwa tenaga pengajar pendidikan di desa masih banyak yang hanya berstatus honorer. Kemudian ada 5 orang yang memiliki keahlian sebagai tukang, dengan adanya masyarakat yang memiliki ahli tukang tersebut bisa memberikan kontribusi untuk pembuatan jasa sampan di jalur sungai subayang.

4.1.3.4 Kondisi Pemerintah Desa

Keberadaan kelembagaan pemerintah desa merupakan hal penting untuk bagaimana wilayah pedesaan memiliki pemimpin di wilayahnya. Dan pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggaraan sistem pemerintah desa, hal ini kepala desa menjadi kepala pemerintahan dan dibantu beberapa perangkat desa untuk bisa melaksanakan roda pemerintahannya dan mengelola wilayah pedesaan. Tugas kepala desa adalah sebuah amanah sekaligus pemimpin masyarakat yang harus mengakar dekat dengan masyarakat, memberikan perlindungan, mengayomi dan melayani masyarakat. Dan keberadaan lembaga BPD yang terdiri dari 5 orang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa, lembaga ini akan menjadi lembaga penting di pemerintahan desa, untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kemudian selain adanya lembaga pemerintah desa, ada pula lembaga diluar dari pemerintah desa, yang biasa disebut lembaga kemasyarakatan, terbentuknya lembaga-lembaga ini tentu juga menjadi penting agar ada di setiap desa, karena akan memberikan kontribusi dan manfaat untuk lingkungan wilayah pedesaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa masih banyak yang bertalut tersebut bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.14 Nama-nama Lembaga Kemasyarakatan Desa Gajah Bertalut

No	Nama Kelembagaan	Jumlah
1.	LPM	1 Kelompok
2.	PKK	1 Kelompok
3.	Posyandu	1 Kelompok
4.	Pengajian	1 Kelompok
5.	Arisan	1 Kelompok
6.	Simpan Pinjam	1 Kelompok
7.	Kelompok Tani	3 Kelompok
8.	Gapoktan	1 Kelompok
9.	Karang Taruna	1 Kelompok
10.	Risma	1 Kelompok
11.	Ormas/LSM	-
Total Jumlah Kelembagaan		12 Kelompok

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

Dengan adanya 12 lembaga-lembaga non formal dimiliki Desa Gajah Bertalut bisa memberikan potensi perkembangan pembangunan wilayah pedesaan, mereka bisa berperan untuk memberikan dorongan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah desa. Lembaga-lembaga tersebut bisa membantu kinerja pemerintah desa untuk membina dan membentuk karakter serta moral masyarakat desa. Hal ini pemerintah perlu memberdayakan lembaga-lembaga yang ada tersebut. Sehingga lembaga-lembaga ada bisa berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dan adanya pembagian wilayah di Desa Gajah Bertalut, sangat membantu kinerja pemerintah desa. Adanya pembagian wilayah perdusun merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Kepala dusun dapat membantu kepala desa dalam hal membina masyarakat agar tentram dan tertib, melakukan upaya perlindungan bagi masyarakat, melakukan penataan dan pengelolaan potensi desa diwilayahnya serta melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah desa dan pembangunan.

4.2 Struktur Organisasi

SUSUNAN ORGANISASI PEMRINTAHAN

DESA GAJAH BERTALUT

KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Tabel. IV.15 Susunan Struktural Desa Gajah Bertalut

No	Nama-nama Aparat Desa	Struktur Pemerintah Desa
1.	Zuber, S.Pd	Kepala desa
2.	Indra, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	Badul Aziz	Kepala Urusan Pemerintahan
4.	Bardi	Kepala Urusan Umum
5.	Dani	Kepala Urusan Pembangunan
6.	Hengki	Kepala Urusan Keuangan
7.	Suherman	Staf Desa/Admin
8.	Rolis Candra	Dusun 1
9.	Sakirman	Dusun 2
10.	Bakri	Dusun 3
11.	Damri	Dusun 4

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA GAJAH BERTALUT

KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Tabel. IV.16 Susunan Struktural Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama Aparat BPD	Struktur BPD
1.	Aljufri	Ketua
2.	Dodi Raga	Sekretaris
3.	Sarianti	Bendahara
4.	Taufik	Anggota
5.	Anto	Anggota

Sumber : Profil Desa Gajah Bertalut 2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Key Informan dan Informan

Deskripsi identitas key informan dan informan merupakan identitas yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian mengenai “Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar”. Deskripsi identitas key informan dan informan dibagi menjadi 4 bagian yakni nama, umur, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan.

Tabel. V.1 Identitas Key Informan dan Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan
1.	Yohanis S.P	Laki - laki	58	S.1	Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar
2.	Zuber, S.Pd	Laki - laki	33	S.1	Kepala Desa Gajah Bertalut
3.	Suherman	Laki-laki	30	SMA	Staf Desa Gajah Bertalut Bidang Admin Kantor Desa
5.	Natrol Amin	Laki-laki	32	SMA	Ketua Pemuda Desa Gajah Bertalut
4.	Sahrial	Laki-laki	47	SMP	Masyarkat Desa Gajah Bertalut
5.	Saldi	Laki-laki	26	SD	Masyarkat Desa Gajah Bertalut
6.	Saryanti	Perempuan	33	SMA	Masyarkat Desa Gajah Bertalut

Sumber: Olahan Peneliti Dari Hasil Wawancara Lapangan 2019

Darai tabel di atas yang menjadi Key Informant dalam penelitian adalah Bapak Yohanis S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar sebagai pelaksana kegiatan pada bidang pembangunan daerah pedesaan khusus pada desa yang berada dalam Kawasan Bukit Rimbang Baling. Dan yang menjadi Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa, Ketua Pemuda, dan Masyarakat Desa setempat dengan adanya Informan di atas merupakan acuan upaya strategi pembangunan seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Desa yang berada dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling yang berstatus sangat tertinggal di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

Dengan beberapa informan dan satu key informan yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar sebagai key informan merupakan responden yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan segala informasi dan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan indikator peneliti gunakan, dan kepala desa juga merupakan hal penting untuk memberikan informasi berkaitan dengan penelitian ini dikarenakan kepala desa merupakan kepala pemerintahan desa di wilayah pedesaan tersebut. Kepala desa menjadi peran penting arah pembangunan sarana dan prasarana pembangunan wilayah pedesaan dan mengetahui segala permasalahan dan kebutuhan desa, dan masyarakat terlibat dalam informan penelitian ini agar mampu memberikan informasi bagaimana keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan wilayah pedesaan.

5.1.1 Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar

Dalam pembahasan BAB ini, akan diuraikan hasil penelitian tentang Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar. Penelitian ini memfokuskan pada pembangunan desa dalam kawasan yang berstatus sangat tertinggal khusus pada desa Gajah Bertalut. Desa berstatus sangat tertinggal adalah desa memiliki IDM terendah yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peneliti mendapatkan data dari hasil Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai beberapa responden di antaranya yaitu Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar, Kepala Desa, Staf Desa, Ketua Pemuda, dan Masyarakat desa setempat.

Dalam mempercepat pembangunan desa berstatus sangat tertinggal tentu perlu kebijakan tepat sasaran dan strategi pembangunan yang efesinsi dan efiktifitas agar tujuan strategi yang digunakan tepat pada tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Agar tujuan strategi pembangunan desa tepat pada sasaran tentu perlu koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kampar, dan pemerintah desa.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didapatkan berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Narasumber

yang dipilih adalah orang yang mengetahui dan terlibat tentang Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar. Dimana terdapat 1 *Key Informan* dan beberapa *Informan*.

Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dan Desa Gajah Bertalut yang berada dalam kawasan.

Wawancara merupakan proses Tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian. Wawancara memfokuskan dan menanyakan upaya Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar.

Adapun subjek dari penelitian ini yang disajikan narasumber atau Key Informan adalah Bapak Yohanis S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kampar. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Indikator yang telah dibuat peneliti tentang Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar, berdasarkan indikator variabel penelitian yang ada di antaranya adalah :

1. Pemberdayaan Ekonomi
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana
4. Kelembagaan Desa

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya yang merupakan pengalokasian sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting untuk dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan penghasilan otonomi desa, dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Seperti kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, kebutuhan kebebasan.

Dengan hal ini perlu adanya program yang mendukung dan keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, hal ini bisa dilakukan dari semua sektor seperti pertanian, pekebunan, perikanan, UKM serta pariwisata. Program-program berkelanjutan ini sudah diatur dalam peraturan Kabupaten Kampar untuk melakukan pengembangan wilayah dengan potensi daerahnya masing-masing.

Dengan dilakukannya program-program ini diharapkan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mampu mengembangkan potensi desa yang masih bestatus sangat tertinggal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Yohanis S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kampar. Menanyakan bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Bapak Yohanis mengatakan bahwa :

“pemberdayaan ekonomi sangat diperlukan setiap desa, itu tercantum dalam BUMDes menggunakan DD dan ADD, semua potensi-potensi desa sudah tertera di dalam BUMDes. Kami melakukan berupa pelatihan perkebunan dan bekerjasama dengan pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa, pelatihan ini dilakukan serentak seluruh desa dikampar secara berkelompok”

Bapak yohanis mengatakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan bersama dengan pemerintah desa berupa :

“menanam cabe, jagung, sayur-sayuran, pelatihan ini dilaksanakan selama 3 bulan, 1 kali dalam setahun”

Dan pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat dan hasilnya juga untuk masyarakat desa. Bapak Yohanis mengatakan :

“dari hasil pelatihan tersebut akan memberikan keuntungan kepada masyarakat, karena hasil dari pelatihan itu diserahkan kepada kelompok masing-masing peserta yang ikut dalam pelatihan, ini salah satu bentuk upaya dari kami Dinas PMD bagaimana memberdayakan ekonomi 8 (delapan) desa yang berada dalam kawasan”

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Zuber, S.Pd selaku Kepala Desa Gajah Bertalut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 13.23 WIB di kediamannya lipat kain. Menanyakan hal yang sama dalam indikator pemberdayakan ekonomi masyarakat bagaimana pelatihan yang dilakukan akan memberikan pada kesejahteraan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dan Bapak Zuber mengatakan :

“Pemberdayaan ekonomi sudah kami lakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, dengan diadakan pelatihan perkebunan pada tahun 2018 tadi di Hotel 3 Dara, untuk pesertanya itu seluruh masyarakat desa, bagi masyarakat yang mau dan tidak mempunyai kesibukan lain”

Bapak Zuber mengatakan hasil panen yang didapatkan dari pelatihan perkebunan sudah dirasakan oleh masyarakat desa, tapi hanya kelompok yang mengelola saja mendapatkan hasilnya, sesuai dengan apa yang ia sampaikan :

“hasil panen itu ada, cuman tumbuhan yang ditanam kebanyakan yang mati, karena ketidak cocokan pada tanah daerah kami, waktu panen kami tidak tau mau jual kemana, karna yang mau menampung hasil panen kami tidak tersedia, dan biaya transportasi daerah kami tinggi”

Peneliti kemudian menanyakan kepada Bapak Zuber mengenai BUMDes Gajag Bertalut, ia mengatakan :

“Desa kami belum memiliki BUMDes, Kami hanya memanfaatkan DD dan ADD untuk pemberdayaan dan pembangunan desa”

Ketiadaan BUMDes pemerintah desa tidak mampu sepenuhnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa, Bapak Zuber mengatakan kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di antaranya adalah petani karet, apa yang dikatakan Bapak Zuber yaitu :

“Mata pencarian masyarakat sini rata-rata berkebun karet, ada yang berternak kerbau, ayam, itu milik pribadi, ada juga milik kelompok dengan cara bagi hasil. Disini ada juga pohon petai, jengkol, kabau, durian, jernang, itu cukup untuk makan masyarakat, kadang buahnya habis dimakan monyet”

Dan untuk aktifitas masyarakat yang tidak memiliki perkebunan dan pekerjaan, Bapak Zuber mengatakan :

“Masyarakat Yang tidak memiliki lahan kebun, mereka sebagai pekerja wiraswasta, dengan sistem upah, hasil jual bagi dua yang punya kebun dengan pekerja, kalo tidak ada yang ngupah mereka menganggur. Ada juga masyarakat mencari ikan kesungai, ada malam hari ada yang siang, hasilnya cukup untuk makan mereka saja”

Peneliti kemudian mewawancarai masyarakat setempat yaitu Bapak Sahrial yang bekerja sehari-harinya sebagai Wiraswasta dikediamannya Desa Gajah Bertalut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 16.30 WIB. Menanyakan bentuk aktifitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, apa yang dikatakan Bapak Sahrial sebagai masyarakat desa gajah bertalut dari hasil wawancara ia mengatakan :

“masyarakat disini banyak berkebun karet, dari hasil karetlah masyarakat untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, itupun hasilnya tidak begitu besar ada 20 kg sekali panen itu paling tinggi disini, perekonomian disini susah, masih banyak masyarakat dengan cara tukar barang untuk memenuhi kebutuhannya, desa kami juga memiliki hutan adat yang bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat bagi masyarakat mau mengambil kayu bisa digunakan untuk pembuatan sampan dan bangunan rumah, hutan adat ini dimiliki bersama dan digunakan bersama, hutan adat yang kami miliki terbatas, kami disini tidak bisa memperluas perkebunan karena keberadaan desa disini berada dalam hutan lindung, sehingga masyarakat desa hanya memberdayakan perkebunan yang ada”

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan, bahwa perekonomian masyarakat masih bisa dikatakan lemah, dikarenakan perekonomian masyarakat hanya ketergantungan kepada perkebunan karet, yang tidak semua masyarakat memilikinya. Masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, karena diantara mereka ada yang tidak memiliki pekerjaan dan perkebunan. Ketiadaan BUMDes juga salah satu kelemahan ekonomi di desa.

Hal ini diperlukan BUMDes untuk bisa memberdayakan ekonomi masyarakat desa, sebagai badan yang menaungi kebutuhan masyarakat desa. Dari BUMDes masyarakat bisa menentukan arah perekonomian mereka dan bisa juga bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini swasta yang bergerak dibidang

usaha yang berkaitan erat dengan sektor usaha masyarakat desa. Hal ini bisa memberikan dorongan kemandirian desa untuk memberdayakan ekonomi desanya masing-masing. Untuk mengembangkan usaha-usaha mereka tentu perlu modal, diperlukannya peran pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengembangan tersebut.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor penting ada didesa dan dikembangkan. Pemberdayaan SDM dengan meningkatkan kualitas intelektual dan keahlian sangatlah mendukung untuk melaksanakan pemerataan pembangunan desa dan membantu upaya pengembangan untuk kemajuan desa.

Strategi sangatlah perlu dibangun untuk meningkatkan kualitas SDM pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan yang dilakukan dengan memotivasi individu untuk meningkatkan kemampuannya dan menentukan jalan hidupnya. Pemberdayaan ditujukan kepada warga desa dengan cara membangun mental dan spiritualnya agar memiliki kepercayaan yang tinggi.

Pemberdayaan pembangunan SDM yang dilaksanakan juga mampu untuk merawat insfrastruktur yang telah dibangun dengan memanfaatkan Dana Desa serta bisa mendorong meningkatkan perekonomian desa. Pengembangan pemberdayaan SDM bisa dilakukan dengan inovasi desa, seperti dibidang pendidikan, kesehatan dan memberikan pelatihan-pelatihan.

Dengan indikator kualitas SDM dari penjelasan diatas peneliti mewawancara Bapak Yohanis S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 21 Mei

2019 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Untuk menanyakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pemberdayaan SDM desa dalam kawasan yang berstatus sangat tertinggal. Dalam hal ini Bapak Yohanis mengatakan :

“Kami berikan berupa bentuk pelatihan pemanfaatan teknologi kepada masyarakat dan aparatur desa, berupa pelatihan Drone, itu kami lakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa yang ada dalam kawasan, dan tahun 2019 ini kita juga akan membentuk pelatihan perbengkelan untuk mesin sampan”

Selanjutnya Peneliti memewancara Bang Suherman dikediamannya Desa Gajah Bertalut ia salah satu masyarakat Desa Gajah Bertalut dan juga sebagai Staf Desa bidang Admin Kantor Desa. Pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 13.18 WIB. Suherman juga adalah salah satu peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Dan peneliti menanyakan pelatihan apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah desa bersama pemerintah daerah upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di desa, Suherman mengatakan :

“kemaren ada pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu pelatihan Droune, pelatihannya kemarin di Hotel Baru Bangkinang, selama 3 hari, saya salah satu yang ikut pelatihan itu, ada juga pelatihan Stanting, dilaksakan dikecamatan untuk anak-anak yang kurang gizi, itu dari pihak kesehatan, tahun 2019 ini akan direncanakan dibentuk pelatihan Bengkel Robin untuk mesin sampan, pelatihan ini sudah kita bicarakan bersama kepala desa, kepala desa sudah ajukan proposal dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah”

Dan perkembangan pelatihan yang telah dikutinya, suherman mengatakan

:

“kami sulit mau mengembangkan pelatihan Droune ini di daerah kami, alat-alat yang dibutuhkan itu mahal, kami tak bisa membelinya, butuh biaya yang banyak untuk bisa mengembangkan pelatihan-pelatihan Droune gitu”

Beberapa program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini suherman mengatakan :

“dari desa ada kegiatan rutinitas magrib mengaji untuk anak-anak didesa, kegiatan ini yang masih berjalan dan berkelanjutan sampai saat ini”

Kemudian peneliti mewawancara masyarakat setempat yaitu Bapak Sahrial yang bekerja sehari-harinya sebagai Wiraswasta dikediamannya Desa Gajah Bertalut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 16.30 WIB. Menanyakan bagaimana tingkat SDM desa dan bentuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga pemerintah daerah telah dilaksanakan akan dirasakan oleh masyarakat desa. Bapak Sahril mengatakan :

“untuk pengembangan SDM disini saya nilai sangat lemah, tidak ada perhatian pemerintah secara khusus untuk melihat pendidikan disini, jam ngajar sekolah sini yang tidak disiplin banyak tenaga pengajar tamatan sekolah SMA, dan kepala sekolah jarang masuk, karna diakan orang gema, bagaimana mau baik SDM disini kalo sistem pengajar seperti itu, pengembangan SDM di pendidikan itukan penting, kami beharap pemerintah betul-betul melihat kondisi pendidikan disini, lihatlah bangunan sekolah kami yang tidak berpagar, kambing-kambing masuk keruangan kelas dan membuang kotoran dalam kelas, sebagian dari ruangan kelas sekolah tidak mempunyai pintu”

Ada bentuk harapan dari masyarakat dengan melihat kondisi SDM yang masih cukup lemah dan untuk dapat perhatian khusus dari pemerintah, wawancara

peneliti dengan Bapak Sahril ia mengatakan :

“kami beharap pemerintah bisa meningkatkan pendidikan didaerah kami, dari bangunan sekolah, guru pengajar, pasilitas, banyak anak-anak sini berhenti sekolah yang seharusnya bersekolah, kami mau menyekolahkan anak-anak keluar sana tapi butuh biaya yang tinggi, sedangkan ekonomi kami disini lemah, mata pencarian masyarkat sini hanya karet, apalagi harga karet lagi murah”

Kemudian peneliti juga mewawancara ketua Pemuda Desa Gajah Bertalut Bang Natrol Amin ia seorang pekerja petani karet di Desa Gajah Bertalut, pada hari Senin Tanggal 17 Juni pukul 19.58 WIB. Dengan menanyakan hal yang sama bagaimana titik SDM desa dan bentuk upaya pemerintah desa serta pemerintah daerah dalam pengembangan SDM di desa. Bang Natrol mengatakan :

“SDM daerah sini masih lemah, daerah kami belum ada MDA dan taman bermain anak-anak disini, anak-anak disini banyak jenuh dan tempat bermain mereka hanya kesungai, saya berharap MDA itu ada karna sangat membutuhkan untuk anak-anak disini, kalo bisa taman bermain anak-anak juga disediakan”

Dan peneliti juga mewawancara bersama Ibuk Saryanti masyarakat Desa Gajah Bertalut yang kerja sebagai Ibu Rumah Tangga dikediamannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 10.15 WIB. Menanyakan bentuk program apa saja yang telah dilakukan oleh pemrintah desa yang telah dirasakan oleh masyarakat desa setempat, dan ibuk Saryanti mengatakan :

“program stanting itu saja yang kami rasakan berjalan, untuk anak-anak sini, diberikan obat untuk gizi anak-anak. program itu satu kali dalam sebulan, dan magrib anak-anak sini juga mengaji”

Bedasarkan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia didesa gajah betalut masih terbilang lemah, dari hasil wawancara beberapa masyarakat mengeluhkan lemahnya pengembangan SDM di desa khusus pada pendidikan, dan pelatihan-pelatihan dilakukan tidak memberikan dampak yang senifikan terhadap kualitas intelektual kepada

masyarakat. Pelatihan-pelatihan dilakukan tidak berkembang di wilayah pedesaan hanya dapat secara individu namun tidak disebarluaskan kepada masyarakat.

Pengembangan SDM di wilayah pedesaan merupakan sebuah hal penting untuk dipemberdayakan dan disesuaikan dengan kondisi suatu masyarakat desa. Pengembangan SDM masyarakat desa harus dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pelatihan dan juga program desa. Dan mampu melahirkan kualitas SDM masyarakat desa yang mendorong pada perekonomian dan pembangunan desa.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan adalah upaya untuk membuat kehidupan yang lebih baik untuk setiap orang. Pembangunan akan berpengaruh kepada perubahan yang mencakup banyak aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, infrastruktur, politik, pendidikan, teknologi dan juga kelembagaan. Bukan hanya itu pembangunan juga menjadi hal penting untuk mempercepat pembangunan nasional. Pembangunan adalah bentuk upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal untuk bisa menjadi daerah yang berkembang dan angka kemiskinan mampu di tekan.

Secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu perencanaan pembangunan yang tepat sasaran pada daerah desa sangat tertinggal sesuai kebutuhan pembangunan yang diperlukan oleh desa untuk menjadi desa yang berkembang.

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah kewajiban oleh pemerintah

untuk membentuk program-program pembangunan disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. pembangunan yang akan dilaksanakan tentu harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, serta peraturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Yohanis S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Untuk menanyakan upaya pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk daerah pedesaan dalam kawasan. Dalam hal Bapak Yohanis mengatakan dari wawancara peneliti ia katakan :

“pihak pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk pembangunan jalan Interpretasi atau jalan penghubung antar desa, dibangun dengan menggunakan Dana Desa, setiap tahun dibangun secara bertahap per 300 meter, tahun 2018 300 meter tahun ini 2019 300 meter sampai nanti penyelesaiannya tahun 2023 30.900 meter untuk seluruh desa dalam kawasan dengan lebar jalan 1,5 meter, jalan setapak yang dibangun karna keberadaannya dalam kawasan, untuk membangun jalan itu tidak bisa luas, Ini sebuah perencanaan untuk dibangun jalan pehubung yang akan selesai 2023. Jalan ini nanti akan difungsikan untuk aktifitas masyarakat disana”

Dalam pembangunan ada sebuah perencanaan-perencanaan yang disusun dan harus direalisasikan, dan pak Yohanis mengatakan :

“perencanaan yang sudah kami susun dan kemudian dirapatkan bersama pimpinan kepala dinas dan kepala daerah setelah itu nanti di kelola melalui dengan Dana Desa masing-masing, baru kita serahkan kepada desa yang mengelolanya, kami dari PMD hanya meminta hasil laporan pekerjaan, kita disini juga mengirimkan tim pemantau disana, memberikan arahan dan petunjuk pekerjaan”

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kepala Desa Gajah Bertalut Bapak Zuber, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 13.23 WIB di

kediamannya liapat kain. Menanyakan pada hal yang sama upaya pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk pengembangan pembangunan wilayah pedesaan dari wawancara peneliti Zuber mengatakan :

“Pembangunan wilayah desa kami menggunakan Dana Desa dan kami memfokuskan pada pembangunan Insfrastruktur desa, yang telah kami kerjakan itu pembangunan jalan interpretasi, pagar lapangan volly, mck, turap, tangga dermaga, gronjong, jalan pemukiman, rehap jalan, pembangunan ini dari anggaran dana desa tahun 2018, dari Dana Desa kami pergunakan juga untuk pembangunan sarana olahraga lapangan volly, bola kaki dan lapangan badminton, tahun 2019 ini dari Dana Desa kami masukan untuk pembangunan penerang jalan, untuk 2020 kami masukan untuk memfokuskan pembangunan jembatan penghubung desa”

Dalam batasan-batasan pembangunan wilayah pedesaan dengan menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Zuber mengatakan batasan tersebut ialah :

“Dana Desa kami fokuskan pada pembanguna sarana dan prasarana yang diperlukan untuk desa, apa-apa saja pembangunan yang diperlukan itu yang kami dahulukan, Alokasi Dana Desa hanya kami pergunakan untuk perangkat desa”

Pembangunan wilayah pedesaan yang dikerjakan secara bergotongroyong dan bersama-sama dengan masyarakat desa, dari wawancara peneliti proses pembangunan wilayah desa Zuber mengatakan :

“proses pembangunan wilayah desa masyarakat kami libatkan, pembangunan diwilayah pedesaan kami lakukan dengan bergotongroyong baik itu ibu-ibu, bapak-bapak serta pemuda sini semuanya terlibat, dari proses perencanaan, rapat-rapat kami juga libatkan masyarakat dengan bermusyawarah sebelum proses pekerjaan, masyarakat yang bekerja dibayarkan dengan menggunakan Dana Desa”

Dan untuk proses pemantauan kinerja dan keterlibatan dari Dinas PMD Zuber mengatakan :

“pihak dinas akan masuk ke desa kalo pekerjaan pembangunan sudah

selesai di kerjakan, mereka mengecek dan melihat hasil pekerjaan, orang-orang camat terkadang juga datang kedesa untuk melakukan pengecekan, diwaktu pekerjaan selesai kami beritahu kepada pihak dinas”

Kemudian dalam bentuk bantuan pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, zuber mengatakan :

“Bantuan daerah pemerintah itu ada, dari pemerintah pusat kita dapat 2 bantuan pembangunan, seperti PLTS dan jaringan internet WI-FI juga dapat dari bantuan pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah kampar kita dapat pembangunan rumah layak yuni untuk masyarakat disini. PLTS yang kita miliki dimanfaatkan untuk penerangan rumah masyarakat desa dan kebutuhan-kebutuhan desa, PLTS kita hidupkan dari sore jam 18.00 sampai waktu tidak terbatas, tergantung berapa daya terkumpul, kalo musim panas terkadang sampe pagi, kalo musim hujan matahari tidak timbul jadi tak bisa dimanfaatkan karnakan tidak mendapatkan daya dari cahaya matahari, biasanya hidup lampu cuman bertahan 5 sampai 6 jam, jam 10 malam terkadang lampu sini sudah mati. Dan kalo untuk WI_FI kita gunakan secara bersamaan dengan masyarakat desa, WI-FI kita hidupkan dari jam 8 sampai mati lampu, tergantung daya plts kita”

Selanjutnya peneliti mewawancara masyarakat menanyakan kebenaran keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa kepada Bang Saldi pekerjaanya sebagai petani karet pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dikediamannya Desa Gajah Bertalut pukul 11.20 WIB. Dalam hal ini bang Saldi mengatakan :

“iya, kami dilibatkan, jalan-jalan desa ini kami kerjakan bersama-sama dengan begotoroyong, pembangunan turap dan gorongjong kami juga kerjakan begotoroyong, dari awal perencanaan dan rapat-rapat dengan desa kami juga dilibatkan sampai tahap pekerjaan”

Dan keterlibatan ibu-ibu dalam proses pembangunan wilayah desa, Saldi mengatakan :

“untuk ibu-ibu juga dilibatkan, mereka pekerjaan untuk mengambil pasir dan mengumpulkan batu-batu bagi ibu-ibu yang mau, dan mereka dibayarkan juga oleh desa”

Berdasarkan dari wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan pembangunan didesa gajah bertalut berjalan dengan menggunakan dana desa, dan

dikerjakan secara begotoroyong dengan hasil musyawarah masyarakat dengan pemerintah desa. Pembangunan wilayah pedesaan gajah bertalut hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik sesuai kebutuhan desa. Pada sisi lain seharusnya pemerintah desa perlu pembangunan bersifat non fisik, dilihat dari hasil wawancara pembangunan yang terus dikembangkan belum memberikan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi dan sdm masyarakat desa.

Pembangunan sarana dan prasarana desa sangat diperlukan, untuk pengembangan kemajuan pada wilayah pedesaan, dan pembangunan yang telah terealisasi bisa memberikan kenyamanan kepada kehidupan masyarakat desa.

4. Kelembagaan Desa

Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Keberadaan kelembagaan sangatlah diperlukan pemerintahan desa sebagai wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah desa, agar pekerjaan pemerintahan desa berjalan dengan struktur dan jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tugas pemerintah desa memberikan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan.

Kelembagaan pemerintah desa selain dari lembaga yang bersifat Formal tetapi juga diperlukan pembentukan lembaga Non Formal, lembaga non formal juga memiliki fungsi dan tujuan, keberadaan lembaga non formal juga bisa mendukung pembangunan dan pengembangan desa, lembaga non formal juga memiliki nilai dan norma yang baik serta membatasi setiap perilaku manusia, dengan ada kesediaan lembaga non formal juga membantu karakter perilaku manusia dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bekaitan dengan kelembagaan peneliti mewawancarai Bapak Yohanis S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Menanyakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pengembangan kelembagaan yang ada di desa baik itu lembaga formal maupun non formal. Dalam hal ini pak Yohanis mengatakan :

“untuk kelembagaan perangkat desa kami berikan pelatihan yang berhubungan dengan sistem pemerintah desa, pelatihan perangkat desa ini kami lakukan satu kali dalam setahun, dan kalo untuk lembaga non formal desa kami serahkan wewenang pemerintah desa untuk mengembagkannya”

Kemudian peneliti mewawancarai kepala Desa Gajah Bertalut Bapak Zuber, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 13.23 WIB di kediamannya liapat kain. Menanyakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam proses pengembangan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa baik itu lembaga formal maupun non formal. Dalam hal ini Bapak Zuber mengatakan :

“lembaga non formal kami di desa ada namun tidak berjalan, kami tidak memberikan anggaran untuk lembaga pedesaan, karna anggaran untuk kelembagaan non formal tidak ada, susah untuk berkembang lembaga ini karna lemahnya masih SDM kami dan masih ketergantungan pada ekonomi”

Dan peneliti juga mewawancarai Ketua Pemuda Desa Gajah Bertalut Bang Natrol Amin ia seorang pekerja petani karet di Desa Gajah Bertalut, pada hari Senin Tanggal 17 Juni pukul 19.58 WIB. Untuk menanyakan langsung apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pemuda dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa yang mendorong pengembangan SDM desa, pembangunan desa dan

perekonomian di desa . Dari wawancara peneliti, Bang Natrol mengatakan :

“pemuda disini dan juga masyarakat sore harinya kami sering memfungsikan serana olahraga yang disediakan oleh desa, adanya pertandingan-pertandingan bola kaki, bola volly, kami ikut berpartisipasi, yang sering buat pertandingan itu di desa tanjung beringin, disana kami sering bermain, dan kami pemuda disini juga ikut membantu untuk pembagunan desa, seperti jalan desa dan bangunan lainnya, kami juga menjadi panitia kalo ada kegiatan-kegiatan desa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain kami tidak bisa laksanakan karna kami tidak memiliki anggaran untuk membuat sebuah kegiatan”

Selanjutnya Peneliti juga mewawancara bersama Ibuk Saryanti masyarakat Desa Gajah Bertalut yang kerja sebagai Ibu Rumah Tangga dikediamannya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 10.15 WIB. Dengan menayakan hal yang sama mengenai kegiatan yang dilakukan kelompok ibuk-ibuk didesa. Dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa yang mendorong pengembangan SDM desa, pembangunan desa dan perekonomian di desa . Dari wawancara peneliti, Ibuk Saryanti mengatakan :

“kami ada kelompok yasinan, tidak berjalan karna banyak dari kami yang sibuk bekerja, sekarang yasinan tidak berjalan lagi.”

Bedasarkan dari wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan kelembagaan pemerintah desa dan lembaga non formal pemerintah desa gajah bertalut terbentuk secara struktur dan mempunyai tugas serta fungsi sesuai dengan aturan yang ada, kelembagaan non formal yang telah dibentuk didesa juga mempunyai peran penting untuk pengembangan wilayah desa, ketidak aktifan lembaga non formal di desa gajah bertalut juga memperlambat pengembangan kemajuan wilayah pedesaan. Hal ini perlu ada keaktifan dan bekerjasama dengan kelembagaan desa yang berkaitan dengan lembaga-lemba non formal didesa. Dan pemerintah desa mampu memberdayaan lembaga-lembaga didesa untuk berperan

aktif dalam pembangunan wilayah pedesaan. Sehingga lembaga-lembaga non formal desa bisa bergerak sendiri dengan berbagai bentuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan serta bisa memberikan dorongan kepada SDM masyarakat desa.

Setelah dilakukannya wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan dengan judul peneliti yaitu “Starategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar” di Desa Gajah Bertalut Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, peneliti menyimpulkan upaya pembangunan dan kemajuan wilayah pedesaan Desa Gajah Bertalut telah dilakukan dengan menggunakan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Upaya pengembangan pembangunan wilayah pedesaan gajah bertalut dilakukan dengan cara bertahap dengan menggunakan dana desa, pembangunan-pembanguna desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, pembangunan yang diutamakan yaitu pembangunan yang bersifat infrastruktur fisik, seperti jalan desa, jalan penghubung antar desa, dan juga pembagunan turap.

Dan berdasarkan penelitian diatas dan menurut teori yang ada dimukakan oleh Syahza bahwa pembangunan pada desa gajah bertalut sudah dilakukan dengan pendekatan sesuai dengan sifat dan cirinya keberadaan wilayah pedesaan. Menurut teori Syahza pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan. Empat upaya besar yang dikemukakan oleh Syahza yaitu, Pemberdayaan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana

Pembangunan, Kelembagaan Desa. Maka pembangunan yang dilakukan oleh desa-gajah bertalut haruslah berkaitan dengan empok pokok tersebut, agar startegi pembangunan desa tepat pada sasaran wilayah desa berstatus sangat tertinggal, karena empok pokok tersebut saling keterkaitan. Dari sumber daya ekonomi, desa mampu untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan berbagai bentuk pelatihan dan bimbingan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat, dan untuk kualitas umber daya manusia, harus memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat sdm yang dimiliki desa agar bisa berdaya saing. Untuk pembangunan prasarana wilayah pedesaan pembangunan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan, perlu ada dilaksakan pembangunan wilayah pedesaan agar desa bisa berkembang. Dan membentuk kelembagaan pedesaan baik lembaga formal maupun non formal desa, untuk bisa memacu dan mendorong ekonomi mayarakat desa dan pembangunan wilayah pedesaan.

5.1.2 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Upaya Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbang Kabupaten Kampar

Pembangunan wialyah desa sangat tertinggal, tentulah bukan hal mudah banyak hambatan dalam proses pembangunan karena keberadaan wilayah terisolir jauh dari daerah perkotaan, dimana akses untuk masuk kedalam wilayah pedesaan membutuhkan waktu cukup lama dan akses untuk menempuh wilayah desa hanya bisa di tempuh melalui jalur air dikarenakan jalan darat belum sepenuhnya dibangun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama Bapak Yohanis

S.P selaku Kasi. Pembangunan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kampar melalui wawancara peneliti pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 09.30 WIB di Kantor Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar. Bapak Yohanis mengatakan :

“Dalam upaya pembangunan 8 desa di rimbang baling, kami memang mengalami beberapa hambatan salah satunya seperti tidak adanya akses jalan darat, itukan akses jalan daratnya belum ada, inikan akan memperlambat proses pembangunan desa-desa disana, jadi mau kesana hanya bisa ditempuh dengan jalur air, jalan darat baru saja kira rencanakan di akhir tahun 2018, pembangunan jalan penghubung antar desa ini kita lakukan secara bertahap dengan menggunakan Dana Desa setiap tahunnya”

Kemudian peneliti juga wawancara Kepala Desa Gajah Bertalut Bapak Zuber, S.Pd pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 pukul 13.23 WIB dikediamannya di lipat kain. Menanyakan bentuk hambatan-hambatan dalam proses pembangunan desa yang dialami. Dan Bapak Zuber mengatakan :

“hambatan-hambatan yang kami alami itu pada akses jalan yang hanya melalui Sungai Sebayang, dan tergantung pada kondisi air, kalo air sungai tinggi kita bisa memuat banyak barang dalam satu sampan, kalo kondisi air lagi kering kita tidak bisa memuat banyak barang dalam sampan, solusinya kita perbanyak sampan untuk mengangkut barang-barang bangunan, transportasi angkutan yang kami miliki disini tidak memuat banyak barang, paling besar sampan disini hanya muatan 1 ton selebihnya di bawah 1 ton, mau bawa barang-barang bangunan jalur air itulah kami lewati, dan untuk ongkos membawa barang bangunan di hitung 1000 perkilonya, seperti semen beratnya 50 kg jadi 50.000 yang kita bayarkan sama pemilik sampan, harga semen disinikan sekisaran 75.000 jadi yang harus kita bayarkan untuk 1 sak semen 125.000 belum lagi peralatan lain seperti kawat dan besi.

Kemudian Zuber menambahkan habatan-hambatan yang dialami desa dalam proses pembangunan jalan Interpretasi atau jalan penghubung antar desa, ia mengatakan :

“hambatan kami dalam proses pembangunan jalan Interpretasi jalan penghubung antar desa, seperti banyaknya batu-batuan yang harus di pecahkan, jalur jalan yang dibangun itukan di daerah perbukitan jadi susah banyak

batu disana, hal inikan perlu alat berat untuk memecahkan batu, kalo hanya tanah masyarakat desa masih bisa mengerjakannya, apalagi alat-alat kerja kami yang terbatas, mengali tanah hanya dengan cangkul dan lingis.

Selanjutnya peneliti wawancara Bapak Sahril Masyarakat Desa Gajah Bertalut yang bekerja sehari-harinya sebagai Wiraswasta dikediamannya Desa Gajah Bertalut pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 16.30 WIB dan ia juga berpartisipasi dalam pembangunan jalan Interpretasi yang ada didesa gajah bertalut, peneliti menanyakan kepada Bapak Sahril bentuk hambatan-hambatan yang dialami masyarakat desa yang bekerja pembangunan jalan interpretasi tersebut. Ia mengatakan :

“masyarakat yang bekerja terkedala karena banyaknya batu-batuan dijalur jalan yang ingin dibangun, karena berada di daerah perbukitan, kita butuh alat berat untuk bisa memecahkan batu-batu di atas, kalo alat berat masuk sinikan merusak huta nantinya, jalur yang dibangun itukan hanya jalan setapak, kalo jalan besar yang dibangun akan memudahkan mobil masuk dan akan lebih merusak hutan. Dan untuk membangun jalan yang besar juga tidak dapat izin dari pemerintah, karena bermasalah dengan status hutan lindung”

Dilihat dari wawancara peneliti di atas, dalam hal ini peneliti menyimpulkan terlihat begitu sulitnya pembangunan wilayah pedesaan dalam kawasan, dan membutuhkan anggaran besar untuk belanja bahan-bahan bangunan dikarenakan bertambahnya ongkos membawa barang bangunan ke wilayah desa, dengan keberadaan desa di wilayah perbukitan dengan berstatus hutan lindung salah satu hambatan dari pembangunan desa.

Dari observasi yang peneliti lakukan bahwa keberadaan wilayah desa gajah bertalut berada dalam kawasan hutan lindung yang jauh dari perkotaan dengan membutuhkan waktu 2 jam untuk menempuh wilayah pedesaan yang hanya bisa melalui akses jalur sungai subayang. Sungai subayang menjadi jalur utama

untuk akses keluar masuk masyarakat desa dengan ibu kota kecamatan, kabupaten maupun ibu kota provinsi. Melalui sungai subayang sangatlah berisiko bagi masyarakat yang melewatinya jika terjadi musim hujan sungai subayang meluap dan arus yang cukup deras tentu hal ini membahayakan keselamatan masyarakat, sebaliknya apabila musim kemarau sungai subayang bisa terjadi kekeringan dan dangkal sehingga sulit untuk dilewati. Selain menjadi jalur utama untuk masuk wilayah desa sungai subayang juga menjadi akses utama aktivitas masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Selain sulit akses untuk masuk wilayah desa Gajah Bertalut, terdapat masih minimnya pendidikan di desa Gajah Bertalut dikarenakan sarana pendidikan yang tidak memadai seperti ruangan kelas yang tidak memiliki pintu dan sekolahpun tidak berpagar. Fasilitas WC yang tidak bisa dimanfaatkan. Serta ada beberapa masyarakat yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan lebih kental berbahasa daerah mereka, dan begitu juga dengan anak-anak di desa Gajah Bertalut.

Dan untuk penerangan desa Gajah Bertalut yang hanya menggunakan PLTS dengan daya yang terbatas dan tenaga listrik yang tergantung pada cahaya matahari, sehingga ketika musim hujan listrik ini tidak bisa digunakan karena tidak mendapatkan cahaya surya dari matahari. Daya listrik yang hanya memanfaatkan cahaya matahari, sehingga pemakainya hanya bisa digunakan beberapa jam saja. Demikian pula pemanfaatan teknologi yang dimiliki desa Gajah Bertalut seperti jaringan Wi-Fi tidak bisa maksimal digunakan, hanya bisa dimanfaatkan pada malam hari, pemakainya juga tergantung pada daya listrik.

Dilihat dari observasi peneliti, desa gajah bertalut yang berada dalam kawasan suaka margasatwa bukit rimbang kabupaten kampar menjadi perhatian untuk pemerintah daerah dan juga untuk desa-desa yang berada dalam kawasan, hal ini butuh strategi yang tepat sehingga target yang telah ditentukan bisa tercapai. Selain dilakukan pembangunan prasarana desa baik pembangunan fisik dan non fisik, juga diperluka di bidang pemberdayaan seperti sumberdaya ekonomi, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang ada didesa, agar pembangunan wilayah pedesaan menjadi seimbang antara pembangunan wilayah dengan kualitas masyarakat desa.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan juga data mengenai desa gajah bertalut yang berstatus desa sangat tertinggal, terdapat beberapa hambatan dalam proses pembangunan wilayah pedesaan, diataranya adalah :

1. Sulitnya akses untuk menuju kewilayah desa, yang hanya memanfaatkan aliran sungai subayang dengan memakan waktu hingga 2 jam dan bisa lebih dengan kondisi arus air ataupun kedalaman air yang terkadang tidak stabil.
2. Terbatasnya muatan sapan sehingga untuk pengangkutan barang-barang bangunan membutuhkan sapan yang banyak dan memakan waktu yang cukup lama, karena kualitas muatan sampan paling besar itu hanya 1 ton.
3. Dengan sulitnya akses, membuat ongkos dan harga barang-barang bangunan tersebut tinggi, ongkos membawa barang bangunan di hitung 1000 perkilonya, seperti semen beratnya 50 kg jadi 50.000 yang kita

bayarkan sama pemilik sampan, harga semen sekisaran 75.000 jadi yang harus dibayarkan untuk 1 sak semen 125.000 belum lagi peralatan lain seperti kawat dan besi.

4. Pembangunan jalan Interpretasi yang jalurnya berada di daerah perbukitan yang banyak terdapat bebatuan sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu yang lama karena proses pembangunan tersebut hanya menggunakan alat seadanya oleh masyarakat. namun apabila pembangunan ini mengandalkan alat berat memungkinkan waktu dan proses penyelesaiannya akan lebih cepat.

Kemudian untuk kendala-kendala yang peneliti jumpa dilapangan berkaitan dengan penelitian yang penelti angkat yaitu Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Suakamarga Satwa Bukit Rimbnag Kabupaten Kampar di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Desa Gajah Bertalut diantaranya adalah :

1. Anggaran pembangunan yang terbatas sehingga proses pembangunan desa hanya bisa dilakukan secara bertahap.
2. Terjadinya keterlambatan pencairan dana desa.
3. Sulit komunikasi atar instansi kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dikarenakan terbatasnya jaringan komunikasi.

Dan untuk masukan dari masyarakat yang didapatkan oleh peneliti dilapangan diantaranya yaitu :

1. Masyarakat menginginkan untuk daerahnya lebih diperhatikan, terutama seperti bidang ekonomi karena masyarakat disana hanya memanfaatkan perekonomian dari hasil karet saja.

2. Masyarakat juga meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih serius memperhatikan daerahnya bukan hanya pembangunan desa namun juga dibidang pendidikan juga lebih diperhatikan.
3. Harapan masyarakat kepada pemerintah daerah cukup besar, seperti dibidang, kesehatan, pendidikan, komunikasi, ekonomi serta pembangunan desa.
4. Dan masyarakat desa juga berharap kepada pemerintah desa dan juga daerah untuk ada solusi yang tepat sehingga kebutuhan ekonomi dan juga pembangunan desa mereka tepenuhi apa yang dijanjikan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah peneliti lakukan dengan judul yaitu “Strategi Pembangunan Desa Sangat Tertinggal Di Kawasan Sukamagra Satwa Bukit Rimbang Baling Kabupaten Kampar” maka pada bab ini peneliti mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam upaya pembangunan desa berstatus sangat tertinggal pembangunan menjadi masalah utama ketertinggal desa, dikarenakan wilayah yang terisolir memerlukan strategi yang tepat pada saran yang memberikan perkembangan wilayah pedesaan dan kesejahteraan masyarakat desa. Karena pembangunan desa sangat berpengaruh kepada kemajuan desa dan perekonomian masyarakat desa, sumber daya manusia dan sosial. Maka dari itu membutuhkan strategi tepat pada sasaran agar pembangunan yang dilakukan bisa memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat desa.
2. Strategi ataupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa gajah bertalaut untuk pembangunan wilayah pedesaan dengan cara melakukan tahapan pembangunan dibidang infrastruktur, dengan melakukan tahapan pembangunan infrastruktur dengan tujuan agar setatus desa yang awalnya

bestatus sangat tertinggal menuju untuk status berkembang ataupun berstatus mandiri. Karena penilaian indikator IDM dibidang pembangunan menjadi penilaian utama untuk perubahan status suatu desa.

3. Pembangunan wilayah pedesaan Gajah Bertalut yang memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur fisik desa, sehingga melemahkan pada sektor perekonomian dan rendahnya kualitas sumber daya manusianya, pembangunan dilakukan dengan menggunakan dana desa sangatlah perlu memperhatikan beberapa sektor yang akan memberikan dorongan kebutuhan pada kehidupan masyarakat desa.
4. Pembangunan wilayah desa gajah bertalut hendaknya juga memperhatikan sisi lain agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan wilayah desa, selain dari pembangunan infrastruktur diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat desa. sehingga pembangunan yang dilakukan menghasilkan output yang seimbang dengan kehidupan masyarakat.

6.2 Saran

1. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, hendaknya pemerintah desa membentuk BUMDes yang nantinya membantu pada perekonomian masyarakat desa. Dengan ada adanya BUMDes desa mampu mandiri dalam pengelolaan otonomi dan memiliki arah pada pemasaran otonomi yang telah dikelola oleh desa.
2. Di bidang Sumber Daya Manusia hendaknya pemerintah daerah dan pemerintah mempunyai program dan pelatihan yang berkaitan dengan kesehatan dan juga kualitas intelektual masyarakat. Khususnya pada bidang

pendidikan, dan membentuk pelatihan kepada pemuda dan masyarakat sesuai dengan Kualitas SDM yang dimiliki. Agar nantinya mampu memberikan dukungan dan dorongan pada pembangunan desa.

3. Dalam bidang pembangunan pemerintahan desa dan daerah harus mampu untuk bisa membangun perkembangan pembangunan yang bersifat non fisik. Agar pembangunan yang dilakukan bersenergi dan tujuan tersebut bisa tercapai secara maksimal.
4. Dalam bidang kelembagaan pemerintah desa dan pemerintah daerah agar bisa memberdayakan kelembagaan yang ada di desa bukan hanya pada lembaga formal desa namun juga pada lembaga-lembaga non formal yang ada di desa juga harus dipemberdayakan. Dengan berbagai bimbingan dan pelatihan pada lembaga yang ada untuk memberikan pengembangan dan pemahaman kepada lembaga yang mereka bentuk. Sehingga tujuan dan fungsi lembaga tersebut bisa berperan aktif untuk membantu pembangunan wilayah pedesaan.

Daftar Pustaka

- Awang, Azam, dan Mendra, Wijaya. 2011. "Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia". Alaf Riau, Pekanbaru
- _____, 2012, "Ekologi Pemerintahan". Alaf Riau, Pekanbaru
- Effendi, Bachtiar. 2002. "Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan". Uhaindo dan Offset, Yogyakarta
- Kansil, CTS, dan Cristinie, 2003. "Pemerintahan Indonesia". Balai Pustaka, Jakarta
- _____, 2008. "Sitem Pemerintahan Indonesia". Balai Pustaka, Jakarta
- Munaf, Yusri, 2016. "Hukum Administrasi Negara". Marpoyan Tujuh Publishing,
- Moenir, 2010. "Manajemen Playanan Umum Di Indonesia". Bumi Aksara, Jakarta.
- Maryani, Dedeh, Aries, Djaenuri, 2012."Manajemen Pemasaran Politik". CV Esvira Mandiri, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011."Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Erlangga. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003."Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)". Reneka Cipta. Jakarta
- _____, 2005."Keybernologi Sebuah Konstruksi Ilmu Pemerintahan". Rineka Cipta, Jakarat
- Salam, Dharma, Setyawan, 2007." Manajemen Pemerintahan Indonesia". Djambatan, Jakarta.

- Siswanto, 2005. "Pengantar Manajemen". Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2012. "Pengantar Manajemen". Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R". Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi, 2010."Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat". Refika Aditama, Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2013." Ilmu Pemerintahan ". Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2005."Pengantar Ilmu Pemerintahan". Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2001. "Pengantar Ilmu Pemerintahan". Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2007. "Ilmu Pemerintahan". Refika Aditama, Bandung.
- Syahza, Almasdi., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonmomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam Jurnal Ekonomi, Th.XII/ 02/Juli/2007. Jakarta: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Soekanto, Soerjonono, 2010."Sosiologi Suatu Pengantar". Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetomo, 2009. "Pembangunan Masyarakat". Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Suharto, Edi, 2010." Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat". Refika Aditama
- Suryono, Agus. 2001. "Teori dan Isu Pembangunan". UM-Press. Jakarta
- Thoha, Miftah, 2011. "Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya". Rajawali Pers, Jakarta

- Rauf, Rahyunir, Sri, Maulidiah, 2015. "Pemerintahan Desa". Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Yusoff, Agus, dan Andi, Yusran, 2007."Desentralisasi Di Indonesia". Red PoSt Prees. Simpang Tiga Pekanbaru Riau
- Winardi, 2000. "Kepemimpinan dan Manajemen". Rineka Cipta, Jakarta
- _____,2003. "Teori Organisasi Dan Keorganisasian". Rineka Cipta, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu, dan Fernandes, Simangunsong. 2015. "Metodologi Ilmu Pemerintahan". IPDN Press, Bandung.
- _____, 2006. "Prospek Pengembangan Desa". Fokus Media, Bandung.
- _____,2003. "Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Fokus Media, Bandung
- Zulkifli, 2005. "Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen". UIR Press. Pekanbaru.

Jurnal :

Febrian, R. A. Akuntabilitas Kebijakan Sektor Kehutanan Di Provinsi Riau.

_____ (2018). Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau). *Kemudi*, 31), 1-35.

_____ PEMBANGUNAN DESA-KOTA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MIGRASI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 15(26), 124-135.

_____ (2018). Fungsi Komunikasi Pemerintah Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 4(1), 503-512. Pekanbaru, Riau.

Mulianto, B. (2018). PEMBANGUNAN DESA DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN WOOLCOCK DAN NARAYAN. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 3(2), 419-428.

_____ KULLA, T., RUMAPEA, P., & TAMPONGANGOY, D. (2018). KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA TINGGILBET DISTRIK BEOGA KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(58).

_____ Syahza, A. (2013). Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan.

Dokumen :

- ☐ Unadang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- ☐ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- ☐ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- ☐ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
- ☐ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa

Sumber Lain :

(online) Putra, Rizki Hendarji. 2019 STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS DESA MENUJU DESA MANDIRI (Studi Desa Danura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran).<http://digilib.unila.ac.id/56016/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

(Online):<https://news.detik.com/kolom/d-4230033/menengok-data-perkembangan-des>

(Online) : <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/27/mendes-sebut-masih-ada-20ribu-lebih-des-tertinggal-di-seluruh-indonesia>.

(Online) : [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)

(Online) : <http://www.suarakampar.com/berita-kunjungi-desa-terisolir-di-kampar-kiri-hulu-ini-permasalahan-yang-dihadapi-masyarakat-.html>

(Online) : <http://bappeda.kamparkab.go.id/web/detailberita/260>

(Online):<https://www.kompasiana.com/deffianggi/5bdafda843322f57130d29b7/dana-desa-triliunan-tapi-banyak-desa-tertinggal?page=all>

